# PERAN PEMERINTAH TERHADAP LANJUT USIA PADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG DI KOTA PALANGKA RAYA

#### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah



Oleh:

SRI WULANDARI NIM. 1202120152

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1438 H/2016 M

#### PERSETUJUAN SKRIPSI

# Peran Pemerintah Terhadap Lanjut Usia Pada Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Di Kota Palangka Raya

Nama : Sri Wulandari

Nim : 120 212 0152

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jenjang : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, Oktober 2016

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

<u>Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI</u> NIP. 19540631 198103 2 001 ENRIKO TEDJA S, M.SI NIP. 19840321 201101 1 012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ketua Jurusan Ekonomi Islam,

<u>Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI</u> NIP. 19540631 198103 2 001 <u>JELITA, M.SI</u> NIP. 19830124 200912 2 002

#### **NOTA DINAS**

Palangka Raya, Oktober 2016

Hal: Mohon di Munaqasyahkan Skripsi

Kepada

Yth, Ketua Panitia Ujian

Munaqasyah Skripsi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaik<mark>um Wr. Wb</mark>.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Sri Wulandari Nim : 1202 1201 52

Judul : Peran Pemerintah Terhadap Lanjut Usia Pada Panti Sosial

Tresna Werdha Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya

Sudah dapat di *Munaqasyahkan* untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

<u>Dra. Hj. RAHMANIAR, M.SI</u> NIP. 19540631 198103 2 001 ENRIKO TEDJA S, M.SI NIP. 19840321 201101 1 012

#### **LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **PERAN PEMERINTAH TERHADAP LANJUT USIA PADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Sri Wulandari, Nim. 120 212 0152 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

|    | Hari   | : Senin          |                               |   |
|----|--|------------------|-------------------------------|---|
|    | Tanggal  | : 07 November 20 | 016                           |   |
|    |  |                  | 07 November 2016<br>Penguji : |   |
| 1. | Jelita, M.SI<br>Ketua Sidang/                  | Anggota          | (                             | ) |
| 2. | <b>Dr. H. Jirhan</b> u<br>Penguji I/ Angg      |                  | (                             | ) |
| 3. | <u><b>Dra. Hj. Rahm</b></u><br>Penguji II/ Ang |                  | K A (                         | ) |
| 4. | Enriko Tedja S<br>Sekretaris / Ang             |                  | (                             | ) |
|    |  |                  | Dalton                        |   |

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<u>Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI</u> NIP. 19540631 1981 198103 2 001

# PERAN PEMERINTAH TERHADAP LANJUT USIA PADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG DI KOTA PALANGKA RAYA

#### **ABSTRAK**

Lanjut usia merupakan seseorang yang berada pada usia 60 tahun keatas dengan kondisi berkurangnya fungsi kesehatan, sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut seringkali lanjut usia mendapatkan masalah dalam hal terlantar maupun ditelantarkan oleh keluarga maupun masyarakat. Mengatasi lanjut usia dalam permasalahan terlantar maupun ditelantarkan, pemerintah telah menyediakan lembaga panti sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang bagi lanjut usia. Panti sosial merupakan sebuah tempat tinggal untuk lanjut usia yang tidak mempunyai tempat tinggal dengan tujuan memberdayakan lanjut usia yang terlantar maupun ditelantarkan. Namun, demikian hasil observasi yang di dapat dalam panti sosial ini adanya kebijakan bahwa hanya menerima lanjut usia dalam keadaan sehat dan mandiri. Padahal yang seharusnya lebih membutuhkan adalah lanjut usia yang tidak dalam keadaan tersebut agar diberdayakan dalam panti sosial ini. Maka, dengan adanya permasalahan tersebut penelitian ini membahas peran pemerintah terhadap lanjut usia pada panti sosial tresna werdha sinta rangkang di kota palangka raya. Adapun rumusan masalah yaitu : (1) Apa fungsi pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia di Kota Palangka Raya. (2) Bagaimana peran pemerintah terhadap lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

Penelitian ini, merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *Kualitatif Deskriptif*. Adapun objek penelitian ini adalah peran pemerintah terhadap lanjut usia di Kota Palangka Raya. Dan subjek penelitian adalah kepala seksi lanjut usia Dinas Sosial Provinsi dan kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk pengabsahan data peneliti menggunakan *triangulasi sumber*. Teknik analisis data ada empat yaitu: pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data dan menarik kesimpulan serta verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia di kota Palangka Raya dengan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan usaha ekonomi produktif. Bantuan yang merupakan tambahan modal untuk usaha lanjut usia untuk menambah penghasilan. Kemudian peran pemerintah terhadap panti sosial tresna werdha sinta rangkang dengan fungsi pelayanan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan lanjut usia baik dalam pemenuhan sandang dan pangan maupun pelayanan kesehatan. Hal ini peran pemerintah terhadap lanjut usia cukup maksimal namun, lebih ditingkatkan lagi dengan tidak membatasi proses penerimaan klien.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Lanjut Usia, Panti Sosial.

# GOVERNMENT ROLE OF ELDERLY AT SOCIAL WELFARE INSTITUTION OF TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG IN PALANGKA RAYA

#### **ABSTRACT**

Elderly was someone who was at the age of 60 years and older with conditions of reduced function of the health, social and economic. The condition was often the elderly had problems in terms of neglected or abandoned by families and communities. Overcoming the problems of the elderly in neglected or abandoned, the government has been providing social welfare institution of Tresna Werdha Sinta Rangkang for the elderly. Social welfare institution was a residence for the elderly who did not had a place to stay with the purpose of empowering the neglected elderly and abandoned. However, such observations can be in social welfare institution have a policy that only receives elderly healthy and independent. In fact, that should be more in need were elderly who were not in these circumstances in order to be empowered in this social institution. Then, with the issue of this study discusses the role of government to the elderly at social welfare institution of tresna Werdha Sinta rangkang in the city of Palangkaraya. The formulation of the problem, namely: (1) What is the role of government on the economy of the elderly in the city of Palangkaraya. (2) How is the role of government to the elderly in Social Welfare Institution Tresna Werdha Sinta rangkang.

This study, a field research using qualitative descriptive approach. The object of this study is the role of government in the city of Palangkaraya and the research subject is the section head elderly Provincial and head of the Social Welfare Institution of Tresna Werdha Sinta Rangkang in the city of Palangkaraya. Methods of data collection by observation, interview and documentation. For validity the data the researchers used source triangulation. Data analysis techniques there are four, namely: data collection, data reduction, data presentation and draw conclusions and verification.

This results indicate that the function of government on the economy of the elderly in the city of Palangka Raya with the function of community empowerment through productive economic business assistance program. The assistance was in addition to venture capital for income elderly. Then the role of the government to social welfare institution Tresna Werdha Sinta Rangkang with service function society through meeting the needs of the elderly both in compliance with food and clothing and health care. It was the role of government to the elderly was maximal however, further enhanced by not limiting the client acceptance process

Keywords: Role of Government, Elderly, Social Welfare Institution.

#### KATA PENGANTAR

# بينالتالاتخال

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERAN PEMERINTAH TERHADAP LANJUT USIA PADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG DI KOTA PALANGKA RAYA" dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para kerabat, sahabat, dan pengikut beliau *illa yaumil qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah. Terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH. MH. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
- 2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar M. SI selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya dan selaku pembimbing I yang selama ini ikhlas meluangkang waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.
- 3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M. SI. selaku pembimbing II yang telah ikhlas memberikan arahan dan penjelasan, serta telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Jelita M. SI selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama perkuliahan dalam menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.

5. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial dan kepala UPT PSTW Sinta Rangkang

yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk penelitian di

lembaga Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

6. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M. HI, Bapak Zainal Arifin M. Hum, Ibu Itsla Yunisva

Aviva, M. E, Sy, dan seluruh staf yang ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN

Palangka Raya.

7. Seluruh dosen-dosen yang mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah yang telah

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

8. Ayah dan Ibu selaku orang tua penulis yang sangat banyak memberikan

bantuan moril, material, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan

selama menempuh pendidikan.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut

membantu penulis dalam penyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang

telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan

kebaikan bagi banyak pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, November 2016

Penulis

Sri Wulandari

Nim. 120 212 0152

viii

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan Judul " PERAN

PEMERINTAH TERHADAP LANJUT USIA PADA PANTI SOSIAL

TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG DI KOTA PALANGKA RAYA",

adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain

dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap

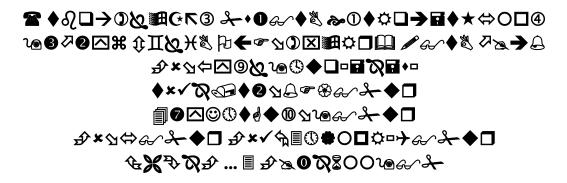
menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2016 Yang membuat Pernyataan,

> <u>Sri Wulandari</u> NIM. 1202 1201 52

ix

# MOJJO



Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah:

"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibubapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orangorang yang sedang dalam perjalanan..."

(Q. & Al-Bagarah: 215)

# *შ£*₿₿£₩₿₳₩₳₩

Alhamdulillahirobbil a'alamin untuk Allah SWJ yang paling utama sembah dan sujud serta syukur, atas limpahan Kasih Bayang-Nya, rahmat-Nya serta Karunia-Nya lah Bkripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat ku kasihi dan kusayangi

MAMA Jerima Kasih atas limpahan Doa, Nasehat dan didikan yang telah diberi dari aku lahir hingga saat ini, Kasih Sayang yang tak terhingga dan semua Materi yang telah kau berikan. Jidak ada yang bisa ku ucapkan selain terima kasih, aku selalu meminta kepada Allah dalam sujudku MAMA diberikan umur panjang

Untuk lelaki Jerhebatku dan Yang telah mengAzhankan aku saat lahir ABAH yang sudah di sisi Allah SWJ, Jerima Kasih Atas limpahan Kasih Bayang semasa hidupmu dan memberikan rasa rindu yang sangat berarti.

Untuk Baudaraku, Ka Wer, terima kasih yaa transferan2 kecilnya selama aku kuliah. ding mat dan ding habibi terima kasih atas doanya selama ini. Bemoga kita menjadi orang-orang yang sukses dalam mencapai segala kebaikan dalam dunia dan akhirat. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada semua keluargaku tanpa doa kalian dalam mencapai kesukseksanku tidaklah sempurna.

Untuk sahabat-sahabatku dan Angkatan 2012 ekonomi Eyariah terima kasih atas canda dan tawa kalian selama ini. Jiada hari yang indah tanpa kalian semua dan semoga kita menjadi orang yang sukses di jalan Allah.

Untuk orang yang spesial Jalaluddin Al Fahmi yang memberikan motivasi dan tak kenal lelah dalam memberikan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Almamater ku Tercinta...

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin           | Nama                          |
|------------|------|-----------------------|-------------------------------|
| 1          | Alif | Tidak<br>dilambangkan | Tidak dilambangkan            |
| ب          | Ba   | В                     | Be                            |
| ت          | Та   | Т                     | Те                            |
| ث          | Śa   | Ś                     | es (dengan titik di<br>atas)  |
| 3          | Jim  | J                     | Je                            |
| ۲          | h}a  | h}                    | ha (dengan titik di<br>bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                    | ka dan ha                     |
| د          | Dal  | D                     | De                            |
| ذ          | Żal  | Ż                     | zet (dengan titik di<br>atas) |
| ر          | Ra   | R                     | Er                            |
| ز          | Zai  | Z                     | Zet                           |
| س          | Sin  | S                     | Es                            |
| ش          | Syin | Sy                    | es dan ye                     |

| ص | s}ad   | s}   | es (dengan titik di<br>bawah)  |
|---|--------|------|--------------------------------|
| ض | d}ad   | d}   | de (dengan titik di<br>bawah)  |
| ط | t}a    | t}   | te (dengan titik di<br>bawah)  |
| ظ | z}a    | z}   | zet (dengan titik di<br>bawah) |
| ٤ | ʻain   |      | Koma terbalik di atas          |
| غ | Gain   | G    | Ge                             |
| ف | Fa     | F    | Ef                             |
| ق | Qaf    | Q    | Ki                             |
| ٤ | Kaf    | K    | Ka                             |
| J | Lam    | L    | El                             |
| ٩ | Mim    | M    | Em                             |
| ن | Nun    | N    | En                             |
| و | Wau    | W    | We                             |
| ھ | На     | Н    | На                             |
| ٤ | Hamzah | ···· | Apostrof                       |
| ي | Ya     | Y    | Ye                             |

# B. Vokal

1.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama     | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------|-------------|------|
| 6     | Fath}ah  | A           | A    |
| ò     | Kasroh   | I           | I    |
| ċ     | D{hommah | U           | U    |

Contoh:

غُرُز : żukira نُكِز : su'ila

# 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan<br>Huruf | Nama           | Gabungan<br>Huruf | Nama    |
|--------------------|----------------|-------------------|---------|
| ٥ يْ               | Fath}ah dan ya | Ai                | a dan i |
| j6 Fath}ah dan     |                | Au                | a dan u |
|                    | wau            |                   |         |

Contoh:

kaifa : kaifa : كَيْفَ : haula

#### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Nama Huruf dan Nama Tanda |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

| -6-۱-6- ی | Fath}ah dan alif<br>atau ya | ā | a dan garis di atas |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------|
| ي         | Kasrah dan ya               | Ī | i dan garis di atas |
| j         |                             | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

qāla : وقِيْل qāla : gīla

#### D. Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta Marbut}ah hidup

Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta Marbut}ah mati

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### Contoh:

raud } ah al-at } fāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ

raud}atul-at}fāl

al-Madīnah al-Munawwarah : ٱلْمُدَيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

nazzala : نَزُّلُ : rabbanā : رَبَّنَا

al-birr : al-birr : al-h}ajju

#### F. Kata Sandang

1.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: Ji. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

al-qalamu : اَلْقَلَمُ ar-rajulu : ألرَّجُلُ

G. Hamzah ( )

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ( , ) ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah ( ç ) itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal:

umirtu : أَمِرْتُ akala : أَكُلَ

Hamzah di tengah:

ta'khużūna : تَأْخُذُوْنَ ta'kulūna تَأْكُلُوْنَ

Hamzah di akhir:

an-nau'u : النَّوْءُ syai'un : شَيْءٌ

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna Fa aufūl-kaila wal-mīzāna Fa sufūl-kaila wal-mīzāna : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

: Wa mā Muh}ammadun illā rasūl

-Syahru Ramad }āna al-lazī unzila fīhi al: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ ٱنْزِلَ فِيْهِ ٱلقُرْانُ

Our'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ الله وَوَفَتْحٌ قَرِيْب : Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb

ِ اللهِ ٱلاَمْرُجَمِيْعًا ِ : Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhi amru jamī'an

Sumber: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya

Press, 2007.

xviii

# **DAFTAR ISI**

| HALAM  | i i                                  |
|--------|--------------------------------------|
| PERSET | TUJUAN SKRIPSI ii                    |
| NOTA D | OINASiii                             |
| LEMBA  | R PENGESAHANiv                       |
| ABSTRA | <b>NK</b> v                          |
| ABSTRA | CTvi                                 |
| KATA P | ENGANTAR vii                         |
| PERNY  | ATAAN ORISINALITASix                 |
| MOTTO  | )x                                   |
| PERSEN | <b>MBAHAN</b> xi                     |
| PEDOM  | AN TRANSLITERASI ARAB-LATINxii       |
| DAFTAI | R ISIxix                             |
| DAFTAI | R TABELxxi                           |
| BAB I  | PENDAHULUAN                          |
|        | A. Latar Belakang Masalah1           |
|        | B. Rumusan Masalah5                  |
|        | C. Batasan Penelitian5               |
|        | D. Tujuan Penelitian5                |
|        | E. Kegunaan Penelitian6              |
|        | F. Sistematika Penulisan7            |
| BAB II | KAJIAN PUSTAKA                       |
|        | A. Penelitian Terdahulu8             |
|        | B. Deskripsi dan Teoritik            |
|        | 1. Teori Peran & Fungsi Pemerintah12 |
|        | 2. Teori Maqāsid Syariʻah27          |
|        | 3. Konsep Lanjut Usia33              |
|        | C. Kerangka Pikir40                  |

| BAB III | METODE PENELITIAN                                      |    |
|---------|--|----|
|         | A. Waktu dan Tempat Penelitian                         | 42 |
|         | B. Pendekatan Penelitian                               | 42 |
|         | C. Objek dan SubjekPenelitian                          | 43 |
|         | D. Teknik Pengumpulan Data                             | 44 |
|         | 1. Observasi   | 44 |
|         | 2. Wawancara   | 45 |
|         | 3. Dokumentasi   | 45 |
|         | E. Pengabsahan Data                                    | 46 |
|         | F. Analisis data                                       | 46 |
| BAB IV  | PEMBAHASAN   |    |
|         | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian                     | 48 |
|         | B. Pemaparan Data                                      | 56 |
|         | 1. Fungsi Pemerintah Terhadap Perekonomian Lanjut usia | 56 |
|         | 2. Peran Pemerintah Terhadap PSTW Sinta Rangkang       | 60 |
|         | C. Analisis Data                                       | 62 |
|         | 1. Fungsi Pemerintah Terhadap Perekonomian Lanjut usia | 62 |
|         | 2. Peran Pemerintah Terhadap PSTW Sinta Rangkang       | 72 |
| BAB V   | PENUTUP  |    |
|         | A. Kesimpulan  | 82 |
|         | B. Saran   | 83 |
| DAFTAI  | R PUSTAKA  |    |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### **DAFTAR TABEL**

| Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian penulis                    | 11 |
|--|----|
| Tabel 2. Peta pemikiran ( <i>Min Map</i> ) Kerangka Pikir Penelitian   | 41 |
| Tabel 3. Luas Wilayah Kota Palangka Raya                               | 49 |
| Tabel 4. Nama Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah RW dan Rukun Tetangga    |    |
| (RT) Kota Palangka Raya  | 49 |
| Tabel 5. Jumlah Data Pegawai PSWT Sinta Rangkang                       | 53 |
| Tabel 6. Jumlah Agama  | 53 |
| Tabel 7. Jumlah Sarana dan Prasarana PSTW Sinta Rangkang               | 54 |
| Tabel 8. Struktur Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang | 55 |

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pada saat lanjut usia, banyak orang sering beranggapan mereka yang berada pada tahap ini sudah tidak produktif lagi. Saat kondisi ini, Islam menganjurkan menghadapi mereka yang berusia lanjut ini perlu seteliti dan setelaten mungkin yang dibebankan kepada anak-anak mereka. Allah memerintahkan perlakuan secara khusus untuk anak-anaknya agar kedua orang tua yang berada pada usia lanjut untuk memperlakukannya dengan penuh kasih sayang.<sup>1</sup>

Sebagaimana acuan dalam memberikan perlakuan yang baik kepada orang tua terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Israa' ayat 23 yang berbunyi :

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.<sup>2</sup>

Sebagaimana ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT. berfirman Allah telah memerintahkan dan memberi pesan janganlah kamu menyembah selain Dia dan selain itu hendaklah kamu berbuat dan bersikap baik dan hormat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Hamdanah, *Psikologi Perkembangan*, Malang: Setara Press, 2009, h. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Karya Agung, 2006, h.387.

terhadap kedua ibu bapakmu. Jika kedua orang tuamu atau salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekalikali kamu memperdengarkan kepada mereka atau kepada salah seorang di antara mereka kata-kata yang kasar dan tidak sopan bahkan kata "ah". Dan janganlah membentak-bentak mereka berdua atau salah seorang di antara mereka, namun hendaklah kamu mengucapkan kata-kata yang hormat, sopan, lemah lembut di hadapan mereka.<sup>3</sup>

Pada saat orang tua sudah mencapai pada tahap yang tidak memungkinkan lagi untuknya bekerja, maka peran serta anak dan keluarga sangatlah dibutuhkan. Seseorang yang sudah memasuki tahap ini disebut sebagai lanjut usia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia merupakan fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Pada umumnya seseorang yang sudah lanjut usia banyak mengalami kemunduran dari segi fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan. Kebutuhan hidup orang lanjut usia yang sangat diperlukan antara lain kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin dan perumahan yang sehat dan kondisi rumah yang tentram dan aman. Hal ini kepedulian dan kebijakan pemerintah serta masyarakat terutama peranan keluarga dalam melindungi seorang lanjut usia sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menangani lanjut usia yang mengalami permasalahan tersebut. Pemerintah juga bertugas untuk mengarahkan,

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Terjemahan Salim Bahreisy dan Said bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002. h. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Kebutuhan Orang Lanjut Usia, <u>Http://Www.Psychologymania.</u> Com/2012/07/Kebutuhan-Hidup-Orang-Lanjut-Usia.Html. (Di akses Pada 08 Maret 2015)

mengatur, dan mengendalikan kegiatan ekonomi melalui berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan dan tindakan langsung di lapangan termasuk dalam perekonomian lanjut usia. Mengenai perlindungan lanjut usia juga telah diberikan oleh Negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang kesejahteraan lanjut usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, yang pada umumnya mewajibkan pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejateraan sosial lanjut usia dengan memberikan hak kepada lanjut usia berupa pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam pelayanan hukum dan bantuan sosial. Ketentuan untuk memenuhi hak lanjut usia juga sudah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, maka dalam hal ini tentunya pemerintah jelas memiliki peran strategis untuk mengatasi masalah lansia.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kota Palangka Raya di sebuah lembaga Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang yang berada di Jl.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Muhadditsir Rifa'i, Memaknai Kembali Birr Al-Walidain: Suplemen Swara Rahima Edisi 46, <a href="http://www.rahima.or.id/index.php.article&catid=Asuplemen&id=1253A2014-11-04-04-16-33&format=pdf&option.com.content&Itemid">http://www.rahima.or.id/index.php.article&catid=Asuplemen&id=1253A2014-11-04-04-16-33&format=pdf&option.com.content&Itemid</a>. (Di akses pada 08 Maret 2015)

Tjilik Riwut, ditemukan bahwa peran pemerintah terhadap lanjut usia yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang sudah cukup baik, karena semua biaya hidup para lansia yang tinggal di panti sosial sudah ditanggung oleh pemerintah dengan syarat lansia tersebut dalam keadaan fisik sehat dan mandiri. Namun demikian, secara tidak langsung dapat dikatakan ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bahwa tidak menerima lansia jika dalam keadaan cacat seperti lumpuh dengan alasan tidak tersedianya tenaga yang bertugas mengurus lansia dengan kondisi tersebut. Melihat kebijakan tersebut ada permasalahan yaitu tentu sangat membutuhkan penanganan dan pelayanan sebenarnya para lanjut usia dalam keadaan cacat dan ini sudah menjadi tugas penting bagi pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan serta perhatian dan juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

Namun, upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia yang tidak produktif di kota Palangka Raya masih kurang jika dilihat dari adanya syarat untuk masuk dalam panti sosial tresna werdha sinta rangkang hanya untuk lanjut usia dalam keadaan sehat dan mandiri yang dapat masuk dalam panti tersebut. Melihat kondisi ini peran pemerintah masih kurang maksimal. Sehingga, penulis berkesimpulan mengambil sebuah judul tentang "PERAN PEMERINTAH TERHADAP LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG KOTA PALANGKA RAYA"

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wawancara dengan "AN" pada tanggal 17 Maret 2016, di Kota Palangka Raya.

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Apa Fungsi pemerintah terhadap perekonomian lansia di Kota Palangka Raya?
- 2. Bagaimana Peran Pemerintah terhadap Lansia pada panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya ?

#### C. Batasan Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah terhadap lansia pada Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya ini lebih berfokus pada deskripsi fungsi pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia kemudian peran Pemerintah terhadap Lanjut usia pada Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya.

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui fungsi pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia di Kota Palangka Raya.
- Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap lanjut usia pada panti sosial
   Tresna Wherda Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya.

#### E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal ilmu yang telah diterapkan dan dapat berguna bagi pengembangan khazanah keilmuan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syari'ah.
- b. Untuk memperdalam wawasan penulis dan pembaca khususnya mengenai suatu peran pemerintahan terhadap ekonomi lanjut usia

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan sekaligus sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah bagi kepustakaan Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian skripsi guna tugas akhir pada program Studi Ekonomi Syariah (ESY) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

#### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### Bab II Kajian pustaka

Kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka yaitu telusuran penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik yang meliputi tentang teori peran dan fungsi pemerintah, teori *maqashid syariah* dan konsep lanjut usia. Selanjutnya kerangka pikir secara rinci mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### Bab III Metode penelitian

Metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, Pendekatan penelitian, objek dan subjek Penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

#### Bab IV Pemaparan dan Analisis Data

Pada bab ini berisikan tentang dekripsi lokasi penelitian, hasil dan analisis data yang membahas mengenai kajian hasil penelitian dan analisis data terhadap fungsi pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia dan peran pemerintah terhadap lansia pada Panti Sosial Tresna Wherda Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya.

#### Bab V Penutup

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peran pemerintah dan pemberdayaan ekonomi ditemukan dalam penelitian Yasin Yusuf yang meneliti tentang "program simpanan keluarga sejahtera persfektif ekonomi Islam". Adapun hasil penelitian ini bahwa program PSKS masih banyak memiliki permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat masih saja berulang-ulang. Dimana program pembagian dana tunai mulai dari BLT, BLSM dan PSKS masih saja menuai permasalahan yang sama. Mulai dari problem-problem PSKS di Indonesia yang diantaranya masih terjadi pemotongan dana PSKS oleh sebagian oknum. Data-data pun masih menggunakan data yang lama sehingga pembagianpun tidak merata dimana masyarakat yang mampu masih mendapatkan dana PSKS. Ekonomi Islam memandang program pemerintahan PSKS lebih kepada mudharatnya sehingga menurut ekonomi Islam program tersebut lebih baik untuk tidak diteruskan karena ekonomi Islam menginginkan kemaslahatan yang bisa dicapai kepada kemuliaan, sehingga perekonomian umat bisa diubah menjadi lebih baik dengan ekonomi yang lebih produktif.<sup>7</sup>

Yasin Yusuf, Program Simpanan Keluarga Sejahtera Persfektif Ekonomi Islam, Skripsi, Palangka Raya: IAIN, 2015. t.d

Ali Nazmudin "Peran Pemerintah Desa terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Tunas Cipetung (Studi Di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)". Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa ikut berperan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi tunas cipetung. Namun, seiring berjalannya waktu, pemeri 8 k lagi menunjukkan lagi perannya terhadap koperasi. Hal ini terja gantian pemerintahan. Selain itu terdapat faktor lain yang menyebabkan hilangnya peran pemerintah desa terhadap koperasi. Faktor tersebut adalah adanya patologi (penyakit) yang muncul dalam birokrasi seperti kurangnya rasa tanggung jawab pemerintah dan juga adanya miskomunikasi antara pemerintah desa dan koperasi.

Faqih As'arie, "peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi syari'ah (studi pada pemerintah daerah kota Tanggerang Selatan)". Adapun hasil penelitian yaitu peran pemerintah daerah kota Tanggerang Selatan dalam pengembangan ekonomi syari'ah meliputi tiga hal yaitu: sosialisasi dan pelatihan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah, membuat peraturan daerah nomor 12 Tahun 2012 tentang koperasi, usaha kecil dan menengah, melakukan rencana dan pembentukan kajian bank pembiayaan rakyat syariah di bawah naungan badan usaha milik daerah (BUMD) kota Tanggerang Selatan, ketiga hal tersebut, dengan peningkatan APBD dan perkembangan industri keuangan syariah dalam rangka

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ali Nazmudin, Peran Pemerintah Desa terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Tunas Cipetung (Studi Di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015. t.d, <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id/15578/1/bab2daftarpustaka.pdf">http://digilib.uin-suka.ac.id/15578/1/bab2daftarpustaka.pdf</a>. Di akses pada tanggal 08 Maret 2016.

pengembangan syariah pemerintah daerah kota tanggerang selatan *relative* belum berjalan dengan maksimal.<sup>9</sup>

Ramadhani Bondan Puspitasari, "Peran pemerintah dalam pemberdayaan lanjut usia di kabupaten sidoarjo". Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten sidoarjo dalam menjalankan pemberdayaan lansia cukup bagus. Hal tersebut di dukung oleh adanya bimbingan keagamaan dan mental spritual, kesehatan berupa posyandu lansia dan senam lansia, pelatihan keterampilan berupa kerajinan tangan dari bahan daur ulang, kemudahan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, serta bantuan sosial berupa uang Rp. 300.000 bagi lansia kurang mampu dan sakit-sakitan. Sedangkan, beberapa faktor penghambat dalam pemberdayaan lansia antara lain pertama, belum adanya koordinasi di antara tiga SKPD yaitu dinas Sosial dan Tenaga kerja, Dinas Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan keluarga berencana (BPMPKB). Kedua, kurang validnya pendataan lansia di kabupaten sidoarj di tingkat desa atau kelurahan. Ketiga kurangnya kesadaran lansia tentang pentingnya pemberdayaan untuk kehidupan mereka. <sup>10</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Terhadap Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Kota Palangka Raya". Penelitian yang penulis lakukan hanya terkhusus

<sup>9</sup>Faqih As'arie, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah* (studi pada pemerintah daerah kota Tanggerang selatan), Skripsi, Jakarta: Universitas Islam NegeriHidayatullah,2014.t.d,<u>Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/1234567/28809/1/FAOIHASE28099ARIEFSH.Pdf., Di</u> Akses Pada Tanggal 08 Maret 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ramadhani Bondan Puspitasari, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Sidoarjo: Universitas muhammadiyah sidoarjo,2015, t.d. <a href="http://fisip.umsida.ac.id/tinymcpuk/gambar/file/6.Bondan.pdf">http://fisip.umsida.ac.id/tinymcpuk/gambar/file/6.Bondan.pdf</a>. Di Akses Pada Tanggal 25 Maret 2016

pada peran pemerintah terhadap lanjut usia yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Kota Palangka Raya. Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu yang ditemukan, berikut beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 1 : Persamaan dan Perbedaan penelitian Penulis

| No | Nama, Judul dan Jenis<br>Penelitian   | Persamaan                                      | Perbedaan  |
|----|---|--|--|
| 1. | Yasin Yusuf, "Program<br>Simpanan Keluarga<br>Sejahtera Persfektif<br>Ekonomi Islam".<br>Kepustakaan.   | Meneliti tentang<br>Pemberdayaan<br>masyarakat | Terkhsusus untuk mengetahui program simpanan keluarga dalam persfektif ekonomi Islam sedangkan penulis hanya pemberdayaan lanjut usia          |
| 2. | Ali Nazmudin, "Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Tunas Cipetung(Studi Di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)" Kualitatif. | Meneliti tentang<br>peran Pemerintah           | Terkhusus untuk upaya<br>pemberdayaan ekonomi<br>melalui koperasi<br>sedangkan penulis<br>hanya menujukan pada<br>pemberdayaan lanjut<br>usia  |
| 3. | Faqih As'arie, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Tanggerang Selatan)". Kualitatif.   | Meneliti tentang<br>Peran Pemerintah           | Terkhusus untuk pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan penulis menunjukkan hanya peran pemerintah terhadap lanjut usia |
| 4. | Ramadhani Bondan<br>Puspitasari,<br>"Peran pemerintah dalam<br>pemberdayaan lanjut usia<br>di kabupaten sidoarjo"<br>Kualitatif   | Meneliti Tentang<br>Peran Pemerintah           | Terkhusus untuk pemberdayaan lanjut usia di sidoarjo. Sedangkan penulis menunjukkan pemberdayaan lanjut usia di kota Palangka Raya             |

| 5. | Sri wulandari           | Meneliti tentang | Meneliti Peran      |
|----|-------------------------|------------------|---------------------|
|    | Peran Pemerintah        | peran Pemerintah | Pemerintah Terhadap |
|    | Terhadap Lanjut Usia Di |                  | Panti Sosial Tresna |
|    | Panti Sosial Tresna     |                  | Werdha Sinta        |
|    | Werdha Sinta Rangkang   |                  | Rangkang Kota       |
|    | Kota Palangka Raya.     |                  | Palangka Raya       |
|    | Lapangan.               |                  |                     |

Sumber: Di buat oleh Penulis

#### B. Deskripsi Teoritik

#### 1. Teori Peran dan Fungsi Pemerintah

#### a. Definisi Peran Pemerintah

Menurut kamus bahasa Indonesia peranan diambil dari kata peran yang berarti pemain, yang memiliki beberapa arti yakni; pemain (sandiwara); tukang lawak dan perangkat, tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat sedangkan kata peranan diartikan dalam dua makna yakni bagian yang dimainkan pemain; dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>11</sup>

Secara etimologi, kata pemerintah berasal dari kata "perintah" berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

 awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan.

11 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Tiga,

Balai Pustaka, Jakarta: 2007, h. 854.

2) akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" yang berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.<sup>12</sup>

Menurut Ermayana Suradinata sebagaimana dikutip oleh Zaidan Nawawi dalam bukunya berjudul manajemen Pemerintah mengatakan bahwa pemerintah adalah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau penguasa suatu Negara.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan, peran pemerintah adalah suatu perilaku yang diinginkan oleh masyarakat untuk menciptakan segala perhatian dalam urusan baik dalam keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan keamanan kehidupan sosial.

#### b. Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan sesuatu yang berhubungan langsung dalam kehidupan bermasyarakat baik hubungan antara manusia dengan setiap kelompok masyarakat maupun keluarga. Berkenaan dengan hubungan masyarakat, pasti akan selalu menyangkut dengan unsur-unsur kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Namun, apabila masyarakat tidak mampu dalam memenuhi segala kebutuhan dasarnya maka pemerintah harus dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan menjalankan segala fungsinya sebagai pemerintah.

xxxiv

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Abidarin Rosidi dan Anggraeni Fajriani, *Reinventing Government:Demokrasi Dan Reformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, h. 5.

 <sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 19.
 <sup>14</sup> Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Serba Jaya, t.t, h.488

Menurut Ndraha dalam buku birokrasi pemerintahan, pemerintah memiliki dua fungsi, yaitu: pertama, fungsi primer (fungsi pelayanan) yaitu fungsi pemerintah sebagai jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam. Sedangkan fungsi pemerintah yang kedua fungsi sekunder (fungsi pembeerdayaan) yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.<sup>15</sup>

Kemudian Rewansyah mengemukakan ada lima fungsi utama (main function) eksekutif (pemerintah) yaitu: 16

#### 1) Fungsi pengaturan atau Regulasi

Fungsi pengaturan atau Regulasi adalah fungsi yang tidak dapat didelegasikan, dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi atau lembaga di luar pemerintahan. Sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat (3) di tetapkan di Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan hukum atau yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, segala sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan penyelengaraan Negara atau aparatur Negara harus mempunyai pijakan atau landasan hukum.

#### 2) Fungsi pelayanan Kepada Masyarakat

 $<sup>^{15}</sup>$  Delly Mustafa,  $\it Birokrasi$   $\it Pemerintahan$ , Bandung: Alfabeta, 2014, h. 102  $^{16}$   $\it Ibid., 103$ 

Konsep pelayanan mengandung bermacam-macam arti, yang meliputi macam kegiatan dan dipakai untuk berbagai bidang studi. Layanan sebagai konsep pelayanan mengandung dua arti yaitu sebagai jasa (komoditi dalam arti luas) dan sebagai seni (cara). Sebagai komoditi dalam arti luas yaitu yang diperjualbelikan (layanan publik) maupun yang tidak diperjualbelikan (layanan *civil* dan layanan *no price*). Sedangkan pelayanan seni terbentuk sebagai upaya pejabat atau pegawai pemerintahan untuk mengefektifkan aktifitas pelayanannya sesuai dengan kondisi orang, makhluk atau lingkungan yang dilayani dalam kondisi apapun, pemerintah juga harus memiliki etika dan benar-benar (*code of conduct*) berkualitas.

#### 3) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial warga masyarakat. Misalnya, saat kondisi ekonomi masyarakat lemah, maka pemerintah harus menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui program pembagunan.<sup>17</sup>

Menurut *Taliziduhu Ndraha dalam bukunya berjudul Kybernologi: sebuah Rekonstrusi Ilmu pemerintahan* bahwa jenis pemberdayaan ada lima yaitu pemberdayaan struktural, pemberdayaan politikal, pemberdayaan ekonomikal, pemberdayaan sosiokultural dan pemberdayaan Filosofik-Etik. <sup>18</sup>

#### 4) Fungsi pengelolaan Aset/kekayaan Negara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid.*, h. 105

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi: Sebuah Rekonstrusi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, h. 66.

Aset atau kekayaan Negara merupakan segala sesuatu yang bernilai ekonomi baik berupa fisik dan non fisik maupun berupa uang, surat-surat berharga dan kekayaan alam yang terdapat di bumi Nusantara. Aset atau kekayaan Negara tak lain dari sumber daya yang terdapat di bumi Indonesia yang merupakan milik bangsa Indonesia. Sumber daya ini terdiri dari Sumber Daya Alam seperti ruang, waktu dan bumi beserta isinya, Sumber daya manusia dan sumberdaya buatan seperti ilmu, seni, teknologi, jalan, jembatan, gedung dan sebagainya.

5) Fungsi keamanan, ketertiban, pengamanan dan perlindungan (Polisional)

Fungsi pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, ketertiban umum, pengamanan dan perlindungan sudah termasuk dengan fungsi pemerintahan di bidang perumusan kebijakan (pengaturan), pelayanan, pemberdayaan dan fungsi pengelolaan aset atau kekayaan negara. Misalnya melaksanakan fungsi pelayanan pengamanan dan perlindungan warga masyarakat dari berbagai gangguan keamanan. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan, ketertiban,pengamanan dan kelestarian SDA dalam teritorial tanah air agar tidak terjadi pencurian kekayaan laut (ikan) serta mengelola aset atau kekayaan Negara untuk kemakmuran bangsa. 19

Dengan demikian, fungsi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakatnya. Untuk sebuah fungsi tentu pemerintah mempunyai peran dalam melaksanakan berbagai macam situasi termasuk dalam menjalankan perannya dalam perekonomian.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan...*, h. 109-110.

Ekonomi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap manusia bertambah secara terus menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Sehingga, kegiatan yang dilakukan dalam ekonomi tentu adanya peran dari pemerintah dalam melaksanakan perekonomian.

Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi yaitu :  $^{20}$ 

- 1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
- 2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
- 3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya.

Adapun Peranan pemerintah dalam perekonomian modern, di klasifikasi dalam 3 golongan besar, yaitu :

#### a. Peranan Alokasi

Pada dasarnya tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang publik yaitu, barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar yang melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut dan tidak hanya dirasakan hanya secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Contoh

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE, 1993, h. 2

barang atau jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar misalnya jalan, pembersihan udara dan sebagainya. Suatu barang di sebut barang publik secara ekonomis pengecualian dapat dilaksanakan akan tetapi biaya untuk mengecualikan segolongan masyarakat dari manfaat suatu barang sangat besar di bandingkan dengan biayanya. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa sistem pasar gagal menyediakan barang dan jasa yang tidak mempunyai sifat pengecualian.<sup>21</sup>

#### b. Peranan distribusi

Peranan lain pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Upaya pemerintah ini tidaklah mudah, namun adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan pendapatan yaitu kepemilikan faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan ditimbulkan oleh sistem pasar di anggap oleh masyarakat masih tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi harus dipisahkan dari masalah keadilan atau arti kata lain, masalah keadilan dan masalah efisiensi merupakan kebalikan. Efisiensi adalah objek ekonomi namun keadilan merupakan objek politik. Efisiensi terjadi apabila perubahan tidak memperburuk keadaan golongan lain namun ini mustahil dilakukan di dalam dunia nyata, kecuali bila yang terkena pengaruh

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid.*, h. 3-6.

memperoleh kompensasi. Dengan demikian pemerintah harus mengambil kebijaksanaan untuk membantu mereka yang menghadapi ketidakadilan ini dengan (progresif), memberikan subsidi yang dananya diambilkan dari pajak yang dikenakan pada mereka yang memperoleh pendapatan atau kekayaan tertentu.

#### c. Peranan stabilisasi

Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi.

Pemerintah mempunyai peranan utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Inflasi atau deflasi merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebijakan moneter. Tanpa adanya campur tangan pemerintah perekonomian akan tidak terkendali sehingga nantinya akan menimbulkan penganguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk itu Pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter dengan menerapkan sarana persyaratan cadangan, tingkat diskonto, kebijakan pasar terbuka, dan lainlain.<sup>22</sup>

Pemerintah juga mempunyai peran penting dalam hal penyelenggaraan kehidupan bernegara yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi, meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*, h. 6-9.

rakyat.<sup>23</sup> Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi dan mengawasi kegiatan-kegiatan ekonomi rumah tangga dan perusahaan. Dalam produksi sektor pemerintah melakukan hasil-hasil kegiatan ekonomi yang melalui badan-badan pemerintah sedangkan produksi sektor swasta melakukan hasil-hasil kegiatan ekonomi melalui perusahaanperusahaan yang dimiliki masyarakat.<sup>24</sup>

Kegiatan ekonomi juga tidak hanya dilakukan oleh rakyat namun juga dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Adapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

# 1. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat

a) Kegiatan produksi yang dilakukan Pemerintah pusat dengan melakukan kegiatan produksi untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Pasal 33 Ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai keperluan hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tujuannya, cabang-cabang produksi semacam itu, baik pengelolaan maupun pemanfaatannya dapat diatur oleh negara sehingga rakyat dapat menikmati secara merata dengan demikian, kepentingan rakyat dapat dilindungi. Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

<sup>23</sup> Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik*, Padang: Akademia Permata, 2013, h. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

<sup>2006,</sup> h. 37.

Suroso Rendro Adi widigdo, *The Essentials of Economics:for Grade VIII of Junior*Dendunce Prentice Hall 2010, h. 109.

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuannya, sumber kekayaan alam ini dapat dikelola oleh negara untuk memupuk pendapatan negara. Selanjutnya, pendapatan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>26</sup>

- b) Kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan tanah untuk lokasi proyek, tempat perkantoran, tempat perumahan pejabat dan menggunakan peralatan proyek.
- c) Kegiatan Distribusi yaitu pemerintah ikut melakukan kegiatan distribusi, baik yang dilakukan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun oleh pemerintah sendiri agar hasil-hasil produksi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu PT PLN, Bulog, Bank-bank pemerintah yang menyalurkan kredit atau modal kepada para pengusaha kecil.

#### 2. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Menurut Lincolin Arsyad sebagaimana dikutip oleh Subandi dalam bukunya berjudul Sistem Ekonomi Indonesia mengatakan bahwa ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi di daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah.<sup>27</sup>

# a) Entrepreneur

Pemerintah daerah sebagai entrepreneur adalah merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset pemerintah daerah dengan lebih

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid* h 110

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 119.

baik dan ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

# b) Koordinator

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang komprehensip bagi kemajuan daerahnya.

# c) Fasilitator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (*Zoning*) yang lebih baik.

#### d) Stimulator

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada di daerah tersebut.<sup>28</sup>

Kegiatan yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kegiatan produksi, konsumsi dan distiribusi yaitu :

xliii

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 143-144.

# a) Kegiatan produksi

Pemerintah daerah melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan perusahaan daerah yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) yaitu perusahaan daerah Air minum (PDAM) melakukan produksi air minum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) melakukan kegiatan produksi Jasa perbankan.

# b) Kegiatan konsumsi

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan barang-barang untuk melakukan usaha produksi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kegiatan konsumsi yaitu dengan menggunakan tanah untuk tempat proyek daerah dan tempat perkantoran, menggunakan peralatan proyek, perumahan dinas dan perkantoran beserta peralatannya dan menggunakan jasa tenaga kerja atau karyawan.

# c) Kegiatan distribusi

Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan perusahaan daerah air minum menyalurkan air minum kepada para pelanggan, pemerintah mengreditkan perumahan atau kios kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa peran pemerintah sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi serta dalam suatu wilayah pemerintah pusat dan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.*, h. 113

pemerintah daerah memiliki tugas dalam menjalankan kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya.

Islam juga memperkenankan pemerintah atau Negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang ataupun dari negara lain.<sup>30</sup>

Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami, didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu :

- 1. Derivasi dari konsep kekhalifahan,
- 2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (fard al-kifayah), serta
- 3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*.

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas- tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik (hayyah thayyibah) bagi seluruh umat. Tanpa adanya pemerintah, maka akan menimbulkan kekacauan dan kesewenangan yang kuat untuk menyantap yang lemah. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan atau *khalifatullah*, untuk merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-qur'an dan sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 46-47.

Fard al-kifayah merupakan kewajiban kolektif atau sosial yang apabila hanya salah satu dari mereka yang melaksanakannya, maka akan mendapatkan dosa secara keseluruhan. Hal demikian berarti pemerintah memiliki peranan penting dalam menjalankan fard al-kifayah, karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik karena kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan fard al-kifayah ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a) Kekurangan informasi
- b) Pelanggaran moral;
- c) Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis

Masyarakat kemungkinan tidak memiliki informasi yang memadai tentang adanya suatu kewajiban publik, sehingga mereka tidak melaksanakannya. Dalam kenyataan, pemerintah biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan masyarakat, karena pemerintah memiliki sumber daya yang lebih baik dalam mencari dan mengolah informasi.<sup>32</sup>

Suatu perekonomian pemerintah tidak hanya memiliki peran dalam perekonomian, namun pemerintah juga mempunyai tugas penting dalam suatu perekonomian. Negara memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi pada dasarnya ditujukan dalam komitmennya untuk memenuhi standar hidup minimum bagi semua anggota masyarakat. Demi tercapainya tujuan-tujuan inI, negara harus menjalankan tugas-tugas tertentu. Negara harus menjamin bahwa sumber-sumber dimanfaatkan sepenuhnya, fasilitas infrastruktur disediakan dengan benar dan ada

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangang Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014. h. 448.

lingkungan yang kondusif bagi aktifitas ekonomi dengan menegakkan hukum dan stabilitas, serta memberikan keadilan bagi semua masyarakat.<sup>33</sup>

Islam berpandangan, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas keadilan sosial. Diantara keadilan yang harus muncul ke permukaan adalah bertanggung jawab terhadap segenap anggota masyarakat dan bertanggung jawab kepada Nafkah masyarakat yang tidak mampu. Peranan pemerintah dalam perekonomian sangat penting. Karena, peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqhasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), yang menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia. <sup>34</sup>

Yusuf Al-Qhardhawi menempatkan peran dan fungsi negara dalam menjamin kebutuhan minimal rakyat, fungsi ini bertujuan utama untuk memelihara keimanan rakyat dengan menekan atau bahkan menghilangkan hambatan ekonomi yang mengganggu mereka denga Allah. Memberikan pendidikan dan pembinaan, fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan rakyat agar kualitas hubungan manusia dengan Allah terus dapat meningkat. Dengan dua fungsi tersebut, maka peran negara dalam ekonomi Islam tidak hanya mengurus ekonomi dalam kaitannya dengan persoalan perut (*economiy is not for* 

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Konsep Perpajakan Dan Peran Bait Al-Mal*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, h. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, h. 64.

the bread alone), tapi juga keimanan merupakan paramenter utama dari keberhasilan sebuah negara.<sup>35</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa kewajiban pemerintah adalah menanggung kesejahteraan masyarakatnya dan ini kewajiban yang harus ditanggung pemerintah pada seluruh masyaraka. Jika Islam sangat menghargai hak hidup masyarakat, maka kewajiban pula mengupayakan kelangsungan hidup. Sebab itu disediakan asuransi rakyat serta pemberian berbagai materi penunjang demi menjaga kelangsungan hidup.

# 2. Teori Magasid Syari'ah @

Secara bahasa, Maqāsid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yakni Maqāsid dan Syari'ah. Maqāsid adalah bentuk jama' dari Maqāsid yang berarti kesengajaan atau tujuan.

yang الى الماء الو اضع تحد ر yang الى الماء الو اضع تحد ر berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>36</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maqāsid Syari'ah*:

"Maqāsid Al-Syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia".

 $<sup>^{35}</sup>$ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 98.  $^{36}$ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 233.

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). <sup>37</sup> Allah SWT berfirman :

Allan SW I berlirman:

Artinya:

Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari (agama) itu. (Q.S. Al-Jatsiah:18).<sup>38</sup>

Islam memiliki kitab suci Al-Qur'an. Sebagai sumber utama, Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Dikalangan ulama ada yang membagi kandungan Al-Qur'an kepada tiga kelompok besar yaitu, *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *amaliyah*. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika dan akhlak. *Amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang keluar dari *Aqwal* (ungkapan-ungkapan), dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia).<sup>39</sup>

Menurut Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra dalam bukunya yang berjudul masa depan ilmu ekonomi:sebuah tinjauan Islam bahwa tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak

-

h.12.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Yusuf Al – Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007,

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 720.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 60.

dalam perlindungan terhadap agama mereka (diin), diri (nafs), akal, keturunan (nasl), harta benda (ma>>l). $^{40}$ 

Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi akan dikaji, namun perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim adalah untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Dalam membahas masalah magashid, pengayaan agama, diri, akal, keturunan dan harta benda telah menjadi fokus utama semua manusia dan manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat.<sup>41</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. 42 Untuk lebih jelas dari pembagian *Magāsid Syari 'ah* berikut penjelasannya:

# a. Kebutuhan *d}aruriyāt*

Kebutuhan *d}aruriyāt* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus diperlihara yaitu agama, jiwa, akal,

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 101.

41 *Ibid.*, h. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam* Persfektif Magashid Al-Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 43.

keturunan dan harta. <sup>43</sup> Berikut di uraikan unsur-unsur dari *Maqāsid Syari 'ah*. <sup>44</sup>

# 1) Agama

Tujuan utama dari *Syari'ah* adalah menjaga atau memelihara agama. Agama sebagai pedoman hidup yang dapat meningkatkan keimanan seseorang muslim mendapat perioritas utama agama dapat membingkai kesemesteaan makna (*the meaning world*) sebagai pandangan dunia yang cenderung mempengaruhi persinifikasi dan personalitas manusia, perilaku, gaya hidup, cita rasa dan prestasi, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan. Iman berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas dan kualitas kebutuhan materi dan psikologi dan juga cara memuaskannya. Agama sebagai media menumbuhkan iman menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motivasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara objektif. Filter moral bertujuan menjaga kepentingan individu (*self interest*) dalam batas-batas kemaslahatan social (*social interest*).

# 2) Jiwa

Kehidupan jiwa raga (*an nafs*) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia

<sup>43</sup>Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqih* I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Muhammad dan Rahmad Kurniawan, Visi &Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip taradin dalam Praktek Bank Islam Modern, Malang: Intimedia, 2014, h. 33

merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya, untuk kemudian akan mendapat balasan pahala atau dosa dari Allah. Kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya sehingga membantu eksistensi kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada dasarnya harus dijauhi.

#### 3) Akal

Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat kauniyah) dan ajaran agama dalam Al-qur'an dan Hadist (ayat-ayat *qauliyah*) manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang mukmin untuk menuntut ilmu. <sup>45</sup>

#### 4) Keturunan

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya. Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan.Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> *Ibid.*, h. 35

#### 5) Harta

Harta material (*māl*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia sangat membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupanya. Selain itu, hampir semua ibadah memelukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji menuntut ilmu, membangun sarana-sarana peribadatan dan lain-lain. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah. Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu perwujudan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara fair. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk, ketidakseimbangan, dan akses-akses lain yang pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>46</sup>

Apabila kelima hal tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat atau dalam ekonmi Islam biasa dikenal dengan *falāh*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *mas]lahah*, karena, kelima hal tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> *Ibid.*, h. 35-36

merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.<sup>47</sup>

# b. Kebutuhan *Hajiyāh*

Kebutuhan *Hajiyāh* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. 48

# c. Kebutuhan *Tahsiniyāh*

Kebutuhan *Tahsiniyāh* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.<sup>49</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia yaitu *d}aruriyāt*, *Hajiyāh* dan *Tahsiniyāh* adalah untuk mencapai kemakmuran dan kemaslahatan yang diinginkan. untuk mencapai sesuatu yang diinginkan maka ketiga kebutuhan tersebut harus terpenuhi.

liv

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Persfektif Maqashid Al-Syariah...*, h. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 228.

# 3. Konsep Lanjut Usia

# a. Definisi lanjut usia

Lanjut usia adalah bagian dari tumbuh kembang. Manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa dan akhirnya menjadi tua. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir dan di masa itu sesorang mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap.<sup>50</sup>

Adapun definisi lanjut usia menurut beberapa pendapat yaitu:

- Menurut Undang-undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada bab I pasal 1 ayat 2, yang dimaksud lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas.
- Dra. Ny. Jos madani Nugroho mengemukakan bahwa lansia merupakan kelanjutan dari orang dewasa.<sup>51</sup>
- Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisis, kejiwaan dan sosial.<sup>52</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli, penulis menyimpulkan lanjut usia adalah seseorang berada pada beberapa perubahan dalam hidup yang berusia umur 60 tahun keatas.

# b. Batasan Umur Lanjut Usia

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Lilik Ma'rifatul Azizah, *Keperawatan Lanjut Usia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011,h. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Tim Penyusun, *Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2008, h. 350.

Menurut badan kesehatan dunia (WHO) penggolongan lansia dikelompokkan menjadi empat yaitu :<sup>53</sup>

- 1. Usia pertengahan (middle age) 45-59 tahun
- 2. Lanjut usia (elderly) 60-74 tahun
- 3. Lanjut usia tua (old) 75-90 tahun
- 4. Usia sangat tua (very old) di atas 90 tahun

# c. Program Pemerintah untuk Lanjut usia Pada Sistem Panti Dan Non Panti

- 1. Program pemerintah pada sistem Non Panti
  - a. Program asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT)

Program asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) bertujuan untuk membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Untuk mencapai tujuan ini, program dilakukan dengan cara pemberian uang tunai kepada lanjut usia (yang memenuhi kriteria) per orang per bulan selama satu tahun melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah. guna memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan, proses pemanfaatan dana oleh lanjut usia dikendalikan oleh petugas pendamping yang ditunjuk melaksanakan fungsi pendampingan. <sup>54</sup>

b. Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia

-

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Vina Dwi Wahyunita & Fitrah, *Memahami Kesehatan Pada Lansia*, Jakarta: CV. Trans info media, 2010, h. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Dokumen Dinas Sosial Provinsi

Program kegiatan usaha ekonomi produktif lanjut usia merupakan program pengentasan kemiskinan lanjut usia yang ditujukan bagi lanjut usia miskin namun tetap potensial dan telah memiliki embrio atau rintisan usaha dalam skala relatif kecil untuk menunjang kehidupan sosial ekonominya sehari-hari. Tujuan program UEP lanjut usia adalah untuk memberikan kesempatan kepada lanjut usia sehat, aktif, dan produktif agar tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menjamin kelangsungan pendapatannya (*income*) nya guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bantuan bersifat langsung kepada lanjut usia, namun sasarannya benar-benar dipilih dari lanjut usia yang masih sehat, aktif, dan produktif.

c. Program Pendampingan dan Perawatan Sosial Lanjut Usia Di Rumah (Home Care)

Pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah atau *home* care lanjut usia adalah bentuk pelayanan bagi lanjut usia yang berada di rumah atau di tengah-tengah keluarga dengan didampingi oleh seorang pendamping dalam pemenuhan kebutuhannya. Pendamping mempunyai peran pembantu serta melayani lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara layak dan manusiawi. Pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah disesuaikan dengan kebutuhan lanjut usia yang memiliki kriteria tersendiri. Home

care lanjut usia memiliki beberapa fungsi antara lain pencegahan, promosi, rehabilitasi dan perlindungan serta pemeliharaan.<sup>55</sup>

# 2. Program Pemerintah Sistem Panti

# a. Program Nursing Care

Perawatan Khusus (Nursing Care) lanjut usia merupakan pelayanan pendampingan dan perawatan lanjut usia di panti atau Lembaga yang dilaksanakan melalui kegiatan sehari-hari oleh tenaga profesional (pekerja sosial/ perawat/ dokter/ psikolog), dengan memiliki beberapa fungsi antara lain rehabilitasi dan perlindungan serta perawatan. $^{56}$ 

# b. Program kegiatan Pelayanan

Kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk lanjut usia sebagai berikut:<sup>57</sup>

- Pelayanan fisik (pengasramaan, permakanan, pakaian)
- Pelayanan keagamaan (bimbingan rohani, tuntunan beribadah)
- Pelayanan sosial (bimbingan individu/kelompok)
- Pelayanan keterampilan (kegiatan penyaluran hobi, dan pengisian waktu luang)
- Pelayanan psikologis (konsultasi, terapi kelompok)
- Pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian obat-obat ringan)

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Dokumen Dinas Sosial Provinsi

<sup>56</sup> Dokumen Dinas Sosial Provinsi

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

- Pelayanan pendampingan (mendampingi kegiatan sehari-hari, mendampingi kegiatan di luar panti)
- Rekreasi (dharmawisata, mendengarkan musik)
- Pelayanan pemakaman( pengurus jenazah)

# d. Dasar Hukum Kegiatan Lanjut Usia

Adapun sebagai landasan atau pedoman bagi penyelenggaran kegiatan lanjut usia yaitu dengan dikeluarkannya:

- Undang-undang No 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia
   Secara umum materi yang di atur dalam undang-undang ini, antara
   lain meliputi: 58
  - a) Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - b) Upaya peningkatan kesejateraan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui pelayanan:
    - Keagamaan dan mental spritual
    - Kesehatan
    - Kesempatan kerja
    - Pendidikan dan pelatihan
    - Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum
    - Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
    - Perlindungan sosial

 $^{58}$  Tim Penyusun, Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan...,h. 620

- Bantuan sosial
- c) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- d) Ketentuan pidana dan sanksi administrasi dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap upaya pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Ketentuan mengenai koordinasi dimaksudkan untuk memadukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia
- Peraturan Pemerintah RI No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
   Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Mengenai peraturan pemerintah RI No 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang disebutkan dalam pasal 1 bahwa Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. <sup>59</sup>

Secara umum penjelasan dalam peraturan pemerintah ini meliputi :

Lanjut usia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, oleh karena

lx

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup><u>Http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5281eac227ed0/parent/lt5281ea4c63d6</u>. Di akses pada 19 Maret 2016

itu peran lanjut usia perlu ditingkatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang diundangkan pada tanggal 30 Nopember 1998 merupakan suatu bentuk upaya pemerintah bersama masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran lanjut usia. Untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan halhal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia. Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan latihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial, bantuan sosial dan pemberian penghargaan terhadap masyarakat.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> *Ibid.*,

# C. Kerangka Pikir

Dari judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti dapat dipahami bahwasanya peran pemerintah terhadap lanjut usia yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan yang terkhusus pada lanjut usia yang berada di panti sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Kota Palangka Raya. Untuk lebih mudahnya maka peneliti akan menggambarkan dalam sebuah bentuk peta pemikiran (*mind map*).

Peran Pemerintah

Peran Pemerintah

Maqāsid Syari 'ah

Peran Pemerintah Terhadap Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna
Werdha Sinta Rangkang Kota Palangaka Raya

Tabel. 2 Peta Pemikiran (*Mind Map*) Kerangka pikir Penelitian

Sumber: Di olah Penulis

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

# A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tentang peran pemerintah terhadap lansia pada panti sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya, yang dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan setelah peneliti mendapat rekomendasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Adapun lokasi penelitian untuk mendapatkan sumber data adalah bertempat di kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan lembaga tersebut dapat memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif deskriptif*. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diteliti.<sup>61</sup>

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai peran pemerintah terhadap lanjut usia yang berada pada Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang di kota Palangka Raya.

# C. Objek dan Subjek Penelitian

# 1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh data yang terkait mengenai peran pemerintah terhadap lanjut usia, yaitu peran yang dilakukan pemerintah terhadap lanjut usia yang berada pada Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang maupun di luar panti sosial di Kota Palangka Raya.

# 2. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah yang memberi sumber informasi mengenai peran pemerintah untuk lanjut usia sehingga mampu menjelaskan tentang objek penelitian, mulai dari Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang yang mengetahui program yang diberikan kepada lanjut usia maupun kegiatan lanjut usia dalam panti sosial dan Kepala seksi lanjut usia yang dapat memberikan data mengenai peran yang dilakukan pemerintah untuk lanjut usia yang di luar panti.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 13.

Untuk ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* sebagaimana pendapat Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>62</sup> Adapun yang menjadi kriteria dalam penetapan subjek yaitu:

- a. Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang yang memiliki jabatan khusus yang telah memahami seluruh ruang lingkup dan semua kegiatan dalam Panti sosial.
- Kepala Seksi Lanjut Usia yang memiliki jabatan khusus dalam bidang pelayanan lanjut usia di Dinas Provinsi Kalimantan Tengah

Agar semakin memperkuat data penelitan, penulis menambahkan lanjut usia sebagai informan. Tujuannya adalah untuk membuktikan peran yang dilakukan pemerintah dan sebagai alat membandingkan hasil dari pemaparan Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang. Adapun jumlah informan yaitu ada 3 orang. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Usia 60 Ke atas
- c. Tinggal di Panti Sosial
- d. Lanjut usia bersedia di wawancarai

# D. Teknik Pengumpulan Data

 $<sup>^{\</sup>rm 62}\,$ S. Nasution,  $Metode\,Research,$  Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 98.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. 63 Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka disini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik itu antara lain sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, kegiatan dan peristiwa. Adapun fungsi teknik observasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data terkait peran yang dilakukan pemerintah terhadap lanjut usia serta mengamati pemberian pelaksanaan program pemerintah kepada lanjut usia.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara yang dilakukan peneliti bersifat tidak terstruktur, artinya wawancara yang dilakukan bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan akurat seperti :

 $<sup>^{63}</sup>$  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013. h. 224.

 <sup>&</sup>lt;sup>64</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelian Kualitatif...*, h. 165
 <sup>65</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 74.

- a. Peran yang dilakukan pemerintah untuk perekonomian lanjut usia
- b. Peran yang dilakukan pemerintah untuk lanjut usia yang berada pada Panti
   Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

# 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda mengenai masalah yang sedang diteliti.<sup>66</sup> Melalui teknik ini, data yang akan diperoleh antara lain:

- a. Gambaran profil kota Palangka Raya
- b. Gambaran Panti sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang
- c. Data-data terkait dengan peran yang dilakukan pemerintah untuk lanjut usia

# E. Pengabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan teknik (*triangulasi*). Menurut moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.<sup>67</sup>

Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan adalah teknik pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut moleong dalam buku metode penelitian kualitatif, menyatakan bahwa teknik *triangulasi* dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang

<sup>67</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 206.

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dicapai dengan :

- 1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara
- 2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan

#### F. Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : <sup>68</sup>

- 1. *Data colletion* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian tentunya hal-hal yang berhubungan dengan peran pemerintah terhadap lansia di panti sosial tresna wherda sinta Rangkang di Kota Palangka Raya.
- 2. Data Reduction (pengurangan data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dan telah dipaparkan apa adanya oleh sumber yang diperoleh, dan dapat dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian.
- 3. Data Display (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari situasi penelitian yang dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dan tidak menutup kekurangannya. Hasil penelitian akan dipaparkan dan digambarkan apa adanya khususnya tentang pengumpulan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan penelitian.
- 4. Conclusion Drawing/Verifyingn (penarik kesimpulan dan verifikasi), yaitu menarik kesimpulan mengenai peran pemerintah terhadap lansia di Panti Sosial

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Matthew B. Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, h. 16-18.

Tresna Wherda Sinta Rangkang di Kota Palangka Raya yang dilakukan dengan melihat kembali hasil penelitian yang diperoleh sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang telah dianalisa. Ini dilakukan agar hasil penelitian secara konkrit sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

# BAB IV PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

# A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

# 1. Gambaran tentang Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geogrifis, Kota Palangka Raya terletak pada : 113°30′-114°07′ Bujur Timur 1°30′-2°24′ Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>69</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Khadijah dan M. Taufiqqurrahman, *Palangka Raya Dalam Angka 15*, t.tp: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2015, hal. 3.

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumput dengan luas masing-masing 117,25 Km<sup>2</sup>, 583,50 Km<sup>2</sup>, 352,62 Km<sup>2</sup>, 572 Km<sup>2</sup> dan 1.053,14 Km<sup>2</sup>.

Tabel. 3 Luas Wilayah Kota Palangka Raya, 2014

| No.           | Kecamatan  | Luas                    | %     |
|---------------|------------|-------------------------|-------|
| 1.            | Pahandut   | 117,25 Km <sup>2</sup>  | 4,4   |
| 2.            | Sebangau   | 58 48                   | 21,8  |
| 3.            | Jekan Raya | 35                      | 13,2  |
| 4.            | Bukit Batu | 572,00 Km <sup>2</sup>  | 21,3  |
| 5.            | Rakumpit   | 1053,14 Km <sup>2</sup> | 39,3  |
| Palangka Raya |            | 2678,51 Km <sup>2</sup> | 100.0 |

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya

Tabel. 4 Nama Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Kota Palangka Raya, 2014.

| Kecamatan | Kelurahan | Rukun Tetangga | Rukun Warga |
|-----------|-----------|----------------|-------------|
|           |           |                |             |

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> *Ibid.*,

| Pahandut                       | Pahandut                    | 96  | 26 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----|----|
|                                | Penarung                    | 50  | 15 |
|                                | Langkai                     | 69  | 17 |
|                                | Tumbang Rungan              | 2   | 1  |
|                                | Tanjung Pinang              | 11  | 4  |
|                                | Pahandut Seberang           | 10  | 2  |
| Jumlah Dikeca                  | Jumlah Dikecamatan Pahandut |     | 65 |
| Sebangau                       | Kereng Bengkirai            | 19  | 3  |
|                                | Sabaru                      | 14  | 3  |
|                                | Kelampangan                 | 30  | 5  |
|                                | Kameloh baru                | 5   | 1  |
|                                | Bereng Bengkel              | 6   | 1  |
|                                | Danau Tundai                | 2   | 1  |
| Jumlah Dikecamatan Sebangau    |                             | 76  | 14 |
| Jekan Raya                     | Menteng                     | 74  | 13 |
|                                | Palangka                    | 124 | 25 |
|                                | Bukit Tunggal               | 95  | 16 |
|                                | Petuk Ketimpun              | 7   | 2  |
| Jumlah di Kecamatan Jekan Raya |                             | 310 | 56 |

| <b>Bukit Batu</b> | Marang   | 7                | 2           |
|-------------------|--|------------------|-------------|
|                   |  | 7                |             |
|                   | Tumbang Tahai                                  | 7                | 2           |
|                   | Banturung                                      | 5                | 3           |
|                   | Tangkiling                                     | 11               | 3           |
|                   | Sei Gohong                                     | 11               | 2           |
|                   | Kanarakan                                      | 4                | 1           |
|                   | Habaring Hurung                                | 7                | 2           |
|                   |  |                  |             |
| Jumlah di Ke      | ecamatan Bukit Batu                            | 52               | 16          |
| Rakumpit          | Petuk Bukit                                    | 5                | 2           |
|                   | Pager  | 3                | 4           |
|                   |  | 3                | 1           |
|                   | Panjehang                                      | 2                | 1           |
|                   |  |                  |             |
|                   | Panjehang                                      | 2                | 1           |
|                   | Panjehang Gaung Baru                           | 2                | 1<br>1      |
|                   | Panjehang Gaung Baru Petuk Berunai             | 2<br>1<br>3      | 1<br>1<br>1 |
| Jumlah di Keca    | Panjehang Gaung Baru Petuk Berunai Mungku Baru | 2<br>1<br>3<br>3 | 1<br>1<br>1 |

Sumber : Kantor Wali Kota Palangka Raya, 2014

# 2. Gambaran tentang Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

# a. Sejarah Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

Sebelum diserahkan/dialihkan ke pemerintah provinsi kalimantan tengah, panti sosial tresna werdha sinta rangkang merupakan unit pelaksana tehnis kantor wilayah departemen sosial provinsi kalimantan tengah di bawah departemen sosial RI yang berdiri tahun anggaran 1980-1981 di atas

lahan tanah 19.950 m2 dengan nama sasana tresna werdha sinta rangkang yang terletak di kel. Banturung Kec. Bukit batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan tengah.

Pada tahun 1994 dengan adanya SK. Menteri Sosial RI Nomor:14/HUK/1994 Tentang pembekuan penamaan sasana Tresna Werdha sinta rangkang, maka berubah menjadi panti sosial tresna werdha sinta rangkang, untuk lokasinya tetap berada di Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>71</sup>

Pada tahun 2000 dengan terjadinya likuidasi terhadap departemen sosial RI dan diberlakukannya otonomi daerah maka Kakanwil Dep.sosial Prov. Kalimantan tengah dan seluruh Aset dan perangkatnya termasuk UPTD diambil alih dan diserahkan ke pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dengan diterbitkannya SK. Gubernur provinsi kalimantan tengah nomor: 71 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas kesejahteraan sosial provinsi kalimantan tengah. Untuk unit pelaksana tehnis sesuai keputusan gubernur provinsi kalimantan tengah no: 224 tahun 2001 Tgl. 29 november 2001 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG.

Tahun 2007 terbit peraturan pemerintah Nomor: 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran negara RI tahun 2007 no. 89 tambahan lembaran negara RI 4741). Maka dasar pelaksanaan tugas juga

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

mengalami perubahan yaitu dengan diterbitkannya peraturan daerah No. 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi kalimantan tengah dan peraturan gubernur provinsi kalimantan tengah Nomor: 60 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja uptd pstw sinta rangkang, PSBRKW pada dinas sosial provinsi kalimantan tengah.<sup>72</sup>

## b. Visi dan misi Panti sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

### 1) Visi panti

"Menuju Lanjut Usia Sejahtera di Hari Tua"

### 2) Misi Panti

- Meningkatkan pelayanan kepada lanjut usia melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- Meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan kepada lanjut usia.
- Meningkatkan hubungan yang harmonis antara sesama lanjut usia, lanjut usia dengan pegawai dan lanjut usia dengan masyarakat.

## c. Data Pegawai PSTW sinta Rangkang

Berikut merupakan jumlah data pegawai berdasarkan jabatannya serta jumlah dari agama yang di anut oleh para lanjut usia yang dijelaskan secara rinci pada tabel :

Tabel. 5 Jumlah Data Pegawai PSWT Sinta Rangkang

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

| No. | Jabatan             | Jenis kelamin |           | Jumlah |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------|
|     |                     | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1.  | Kepala Panti        | 1             | -         | 1      |
| 2.  | Kasubbag Tata Usaha | 1             | -         | 1      |
| 3.  | Staf Tata Usaha     | 5             | 6         | 11     |
| 4.  | Pekerja sosial      | 3             | 3         | 6      |
| 5.  | Dokter              | 1             | -         | 1      |
| 6.  | Psikolog            | 1             | -         | 1      |
| 7.  | Perawat             | 1             | 1         | 2      |
| 8.  | Tenaga Kontrak      | 4             | 4         | 8      |
| 9.  | Lanjut Usia         | 55            | 45        | 100    |
|     | Jumlah              |               |           |        |

Sumber: Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

Tabel. 6 Jumlah Agama

| No. | Agama      | Jumlah   |
|-----|------------|----------|
| 1.  | Islam      | 36 orang |
| 2.  | Kristen    | 57 orang |
| 3.  | Katolik    | 2 orang  |
| 4.  | Kaharingan | 5 orang  |

Sumber: Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

# d. Sarana dan Prasarana PSTW Sinta Rangkang

Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap lansia yang berada di panti mempunyai berbagai fasilitas yaitu dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 7 Jumlah Sarana dan Prasarana PSTW Sinta Rangkang

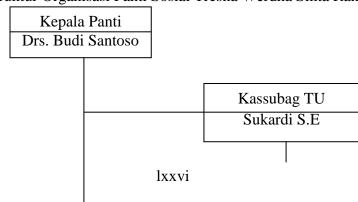
| No. | Sarana dan Prasarana       | Jumlah  |
|-----|----------------------------|---------|
| 1.  | Kantor                     | 1 unit  |
| 2.  | Pos jaga Panti             | 1unit   |
| 3.  | Gedung aula                | 1unit   |
| 4.  | Mushola                    | 1unit   |
| 5.  | Dapur panti                | 1unit   |
| 6.  | Ruang perawatan/poliklinik | 1unit   |
| 7.  | Ruang funsional            | 1unit   |
| 8.  | Wisma/asrama               | 10 unit |
| 9.  | Ruang isolasi              | 1unit   |
| 10. | Gudang                     | 1unit   |
| 11. | Ruang ketrampilan          | 1unit   |

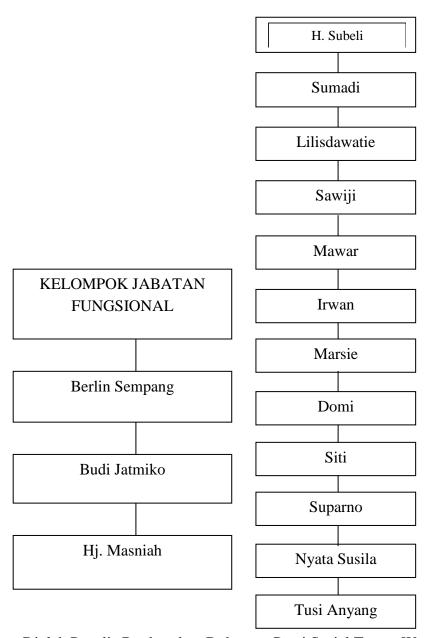
Sumber: Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

## e. Struktur Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

Sama seperti halnya bentuk-bentuk lembaga lainnya yang mana selalu ada seorang pemimpin yang berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi jalannya dalam sebuah kelembagaan. Begitu pula dengan panti sosial tresna werdha sinta rangkang struktur kelembagaan dipimpin oleh kepala panti dan beberapa jabatan lainnya sesuai struktur organisasi mereka. Adapun struktur dari panti sosial tresna werdha sinta rangkang yaitu :

Tabel. 8 Struktur Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang





Sumber : Diolah Penulis Berdasarkan Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

## B. Pemaparan Data

## 1. Fungsi pemerintah terhadap perekonomian Lanjut usia

Berikut ini merupakan hasil wawancara antara penulis dengan kepala seksi lanjut usia yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia. Dengan menanyakan kebijakan pemerintah terhadap lanjut usia.

### Bapak NR mengungkap, bahwa:

"Kebijakan tentu sangat berpihak pada lanjut usia, cuman kebanyakan kita ada program-program dalam rangka kebijakan itu banyak program-program pemerintah yang bisa kita laksanakan untuk pelayanan lanjut usia contohnya lewat panti dan di luar panti ada juga kebijakan kita melakukan pelayanan seperti bantuan untuk ekonomi produktifnya ada juga kegiatan *home care*."

Berdasarkan pernyataan responden, bahwa pemerintah sangat berpihak terhadap lanjut usia dengan kebijakan membuat program-program untuk lanjut usia. Untuk menjalankan kebijakan tersebut mereka melaksanakan program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui berbagai pelayanan untuk para lanjut usia. Seperti halnya melalui panti dan di luar panti. Kemudian penulis menanyakan seperti apa bentuk program bantuan untuk ekonomi produktif dan kegiatan *home care*.

### Bapak NR mengungkapkan, bahwa:

"Home care itu adalah pelayanan pendampingan kepada keluarga yang mempunyai lanjut usia tetapi lanjut usia yang kurang mampu artinya ada petugas-petugas kita yang datang untuk memberi dorongan ke keluarga supaya lebih memperhatikan kepada pelayanan lansia. Misalnya kita sekedar ngobrol. Misalnya, katakanlah kakek sudah mandi belum gitukan nanti kalau belum mandi katakanlah inikan pendamping. Masa nggak malu keluarga sendiri orang lain yang memperhatikan itukan dorongan kita. Karena kebanyakan kita nggak tau lah ada mungkin keluarga-keluarga yang kurang memperhatikan kepada lanjut usia atau orang tuanya. Selain home care ada bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP, bantuan untuk stimulan usaha sebetulnya, jadi lansia-lansia yang mempunyai embrio usaha

 $<sup>^{73}</sup>$  Wawancara dengan Narasumber NR selaku Kepala seksi Lanjut Usia, pada tanggal 08 Juni 2016.

katakanlah dia punya ya dagang kecil-kecilan kita bantu modal ditambah gitulah dari pemerintah."<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan responden di atas, bahwa *home care* adalah pelayanan kepada lanjut usia dengan memberi motivasi kepada keluarga agar lebih memperhatikan lanjut usia. Kemudian usaha ekonomi produktif berupa tambahan modal untuk lanjut usia yang mempunyai usaha kecil-kecilan. Dari pelaksanaan program tersebut setiap tahun atau perbulan.

## Bapak NR mengungkapkan, bahwa:

"Kalau program kegiatan seperti *home care* itu dilaksanakan selama 1 tahun pendampingan jadi nanti dia seminggu misalnya 2 kali ke keluarga lanjut usia. Kalau untuk UEP kebetulan setahun ini belum jalan, dikarenakan anggaran belum ini, karena ada penghematan. Jadi belum jalan, rencananya kan di kabupaten yang UEP ini dilaksanakan di kabupaten dan di kotim seruyan. Nggak banyak sih cuman kita berharap setiap tahun bisa meningkat. Mungkin karena keterbatasan ada penghematan itu."

Berdasarkan pernyataan responden, bahwa kegiatan atau pelayanan untuk para lanjut usia seperti *home care* itu dilaksanakan selama 1 tahun ke rumah lanjut usia yang mendapatkan program tersebut dengan mengunjungi 2 kali dalam 1 minggu dan untuk usaha ekonomi produktif dalam tahun ini belum dapat dilaksanakan karena adanya penghematan anggaran.

Apakah program ini setiap tahun pasti terlaksana.

Bapak NR mengungkapkan, bahwa:

"Insya Allah kalau program itu oleh pemerintah masih di inginkan pasti ada. Namun bulannya dari awal tahun, nanti bulan apa ni kita inikan, itu untuk UEP. Kalau yang *home care* ya jalannya 1 tahun untuk pendampingan. Ada

<sup>75</sup> Wawancara dengan Narasumber NR selaku Kepala seksi Lanjut Usia, pada tanggal 08 Juni 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Wawancara dengan Narasumber NR selaku Kepala seksi Lanjut Usia, pada tanggal 08 Juni 2016.

kegiatan lain juga sih yang sebetulnya di daerah kita yang mungkin belum dilaksanakan kalau pusat di jawa itu kan banyak ada yang kaya family support. Sementara di kitakan ada beberapa saja, mungkin karena keterbatasan anggaran dari pemerintah."<sup>76</sup>

Berdasarkan pernyataan responden, bahwa program-program yang diberikan pasti terlaksana kalau pemerintah masih menginginkan program tersebut dan juga untuk melaksanakan program usaha ekonomi produktif akan ditentukan bulannya setelah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Kemudian bapak NR menyebutkan adanya program-program yang belum bisa dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran dari pemerintah. Kapan terlaksananya program tersebut.

## Bapak NR mengungkapkan, bahwa:

"Kalau *home care* ini baru tahun ini, karena ini program baru. Kalau UEP,tahun-tahun kemaren sudah ada. Dari tahun 2012 dan sebelumnya pun sudah ada. Kadang-kadang namanya itu berbeda-beda tapi tujuannya sama cuman beda penyebutannya. Ada lagi program aslut yang dari pusat langsung, aslut itu asistensi lanjut usia terlantar. Program ini khusus untuk lanjut usia yang tidak berdaya misalnya dia hanya bisa duduk, ini dapat bantuan langsung berupa uang tunai lewat kantor pos dan ada juga pendampingannya." <sup>77</sup>

Berdasarkan pernyataan responden bahwa, program *home care* baru dilaksanakan tahun ini, karena program baru dari pemerintah. Sedangkan untuk usaha ekonomi produktif sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, namun untuk penyebutan program terdapat perubahan tetapi maksud dan tujuan sama. NR menyebutkan bahwa ada program yang disebut dengan Aslut, program ini

 $<sup>^{76}</sup>$  Wawancara dengan Narasumber NR selaku Kepala seksi Lanjut Usia, pada tanggal 08 Juni 2016.

 $<sup>^{77}</sup>$  Wawancara dengan Narasumber NR selaku Kepala seksi Lanjut Usia, pada tanggal 08 Juni 2016.

berupa uang tunai yang diberikan kepada lanjut usia melalui kantor pos. Penulis menanyakan seperti apa bentuk program Aslut.

### Bapak NR mengungkapkan, bahwa:

"Program aslut itukan program pemerintah pusat, anggarannya pun dari pusat langsung program itu kan yang dapat uang setiap bulan 200 ribu untuk para lanjut usia lewat kantor pos ada pendampingannya juga yang mengambilkan uang itu para pendamping para kabupaten juga. Jadi di kita ada 800 orang yang menerima itu. Jadi yaa aslut itu kegiatan yang sebenarnya bagus banget. Artinya mereka dapat tambahan untuk kebutuhan dasarnyalahkan terpenuhi misalnyakan 1 bulan dikasih uang 200 ribu jatah untuk memenuhi kebutuhan gizinya."

Berdasarkan pernyataan responden di atas, bahwa program aslut (asistensi lanjut usia terlantar) merupakan program dari pemerintah pusat langsung berupa anggaran yang diberikan setiap bulan 200 ribu yang melalui kantor pos yang ada di setiap kabupaten. Beranjak dari pertanyaan sebelumnya penulis menanyakan terkait permasalahan tentang lanjut usia yang mengalami cacat. Apakah ada panti untuk lanjut usia yang berada dalam keadaan cacat.

### Bapak NR mengungkapkan bahwa:

"Kalau untuk panti bagi lanjut usia yang cacat itu di kalimantan masih tidak ada dan kalau program pemerintah untuk panti itukan alternatif terakhir jadi keluarga dan masyarakat dulu yaa salah satunya tadi pendampingan langsung lewat keluarga." <sup>79</sup>

Berdasarkan pernyataan responden, bahwa tidak mempunyai panti khusus yang menangani atau menampung lanjut usia apabila dalam keadaan cacat, karena bagi pemerintah panti adalah alternatif terakhir untuk menangani

 $<sup>^{78}</sup>$  Wawancara dengan Narasumber NR selaku Kepala Seksi Lanjut Usia pada tanggal 1 Agustus 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Wawancara dengan Narasumber NR selaku Kepala Seksi Lanjut Usia pada tanggal 1 Agustus 2016.

lanjut usia. Namun, seharusnya keluarga dan masyarakatlah yang lebih utama menangani lanjut usia.

# 2. Bagaimana Peran Pemerintah terhadap Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Kota Palangka Raya

Hasil wawancara dengan kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dengan menanyakan peran pemerintah terhadap lanjut usia yang ada di panti sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

Bapak BS mengungkapkan, bahwa:

"Peran pemerintah terhadap panti sosial ini sudah lumayan baik. Yaa karena kita kan sudah punya perawat sendiri, dokter sendiri untuk ngerawat yang di dalam situ. Kalo sakit kita periksa awal kalo kita tidak bisa menangani baru kepuskesmas rujukan ke rumah sakit jadi yaa sudah relatif terkendala." <sup>80</sup>

Berdasarkan pernyataan responden di atas, bahwa peran pemerintah terhadap lanjut usia yang ada di panti sosial tresna werdha sinta rangkang sudah baik dengan tersedianya dokter untuk menangani lanjut usia apabila dalam keadaan sakit. Untuk biaya penggunaan fasilitas sarana dan prasarana dalam panti.

Bapak BS mengungkapkan, bahwa:

"Kalau untuk biaya sekarang sudah pakai BPJS sudah kita daftarkan ke BPJS gratis dan juga fasilitas di sana sudah disediakan. Misalnya sandang pangan sudah disediakan oleh pemerintah. Tidak dipungut biaya sepersenpun untuk kliennya. Terus ada program nursing care pelayanan untuk pelayanan khusus yang sudah tidak bisa apa-apa. Terus di situ ada ada juga bimbingan mental ya bimbingan rohani, terus bimbingan kesehatan itu misalkan senam dan bimbingan keterampilan."

<sup>81</sup> Wawancara dengan Narasumber BS selaku Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang pada tanggal 14 Juni 2016

 $<sup>^{80}</sup>$ Wawancara dengan Narasumber BS selaku Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang pada tanggal 14 Juni 2016

Berdasarkan pernyataan responden di atas, bahwa untuk biaya dalam penggunaan sarana dan prasarana maupun kebutuhan sandang pangan dalam panti sosial tersebut tidak dipungut biaya atau gratis yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Seperti apa bimbingan keterampilan yang diberikan

Bapak BS mengungkapkan, bahwa:

"Bikin anyam-anyaman seperti bakul, lanjung, tas rajut dan bikin sapu lidi. Selain itu ada juga yang nanam bawang, ya nanam-nanam di kebun." 82

Berdasarkan pernyataan responden di atas, bahwa bimbingan keterampilan yang diberikan dengan membuat beberapa jenis anyaman dan ada juga yang berkebun sayur-sayuran. Modal untuk keterampilan tersebut dari pemerintah atau dari lanjut usia sendiri.

Bapak BS mengungkapkan, bahwa:

"Dulu dari kita, setelah itu dikelola dia sendiri dan untuk sendiri. Sekarang sudah berlanjut sendirinya." 83

Berdasarkan pernyataan responden, bahwa untuk bahan-bahan dalam melakukan kegiatan keterampilan sudah diberikan oleh pemerintah dan mereka hanya melanjutkannya. Hasil keterampilannya untuk apa.

Bapak BS mengungkapkan bahwa:

"Yaa di jual untuk diri sendiri. Kadang-kadang di jual di pasar, kadang-kadang di pameran. Kadang-kadang juga ada orang ngambil." <sup>84</sup>

<sup>83</sup> Wawancara dengan Narasumber BS selaku Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang pada tanggal 14 Juni 2016

 $<sup>^{82}</sup>$  Wawancara dengan Narasumber BS selaku Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang pada tanggal 14 Juni 2016

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Wawancara dengan Narasumber BS selaku Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang pada tanggal 14 Juni 2016

BS mengungkapkan, bahwa hasil keterampilan dari lanjut usia di jual di pameran, pembeli datang langsung ke panti dan bisa juga lanjut usia menjual sendiri ke pasar.

### C. Analisis Data

Setelah melakukan pemaparan data yang diperoleh, maka selanjutnya penulis melakukan analisis data terhadap hasil penelitian. Terkait dengan hasil penelitian di atas, maka penulis melakukan analisis data terhadap hal-hal yang terkait dengan rumusan masalah pada skripsi ini, agar nantinya semua rumusan masalah yang ada akan terjawab.

Pada skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yaitu fungsi pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia dan peran pemerintah terhadap lanjut usia di panti sosial tresna werdha sinta rangkang di Kota Palangka Raya.

### 1. Fungsi Pemerintah Terhadap Perekonomian Lanjut Usia

Pemerintah melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan dan mengarahkan perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan. Untuk melaksanakan perannya tersebut pemerintah melaksanakan kebijakan dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Karena, kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan perorangan, kelompok maupun masyarakat.

Terkait dengan permasalahan lanjut usia pemerintah telah membuat kebijakan seperti yang telah dipaparkan oleh bapak NR bahwa adanya kebijakan pemerintah terhadap lanjut usia melalui program-program serta pelayan untuk lanjut usia dengan sistem panti sosial dan sistem luar panti sosial. Sebagaimana dalam hal ini fungsi pemerintah adalah membuat kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh :

Soewargono dan Djohan dalam buku yang berjudul birokrasi pemerintahan bahwa fungsi utama pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat. 85

Pendapat tersebut menjelaskan pemerintah mempunyai fungsi utama dengan membuat kebijakan publik karena kebijakan yang dibuat selalu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat diketahui pemerintah sudah membuat kebijakan untuk para lanjut usia sesuai dengan fungsi pemerintah. Pemerintah telah melaksanakan kebijakannya dalam mengatasi permasalahan yang dialami lanjut usia dengan memenuhi segala kebutuhan lanjut usia melalui program-program maupun pelayanan.

Pemerintah melaksanakan program tersebut melalui dua sistem pelayanan yaitu sistem luar panti sosial dan panti sosial. Untuk program yang ada di luar panti sosial yaitu dengan program *home care*, program asistensi lanjut usia terlantar (ASLUT) dan program usaha ekonomi produktif (UEP).

Berikut merupakan penjelasan dari tiga program tersebut :

a. Program *Home Care* (pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah)

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Delly mustafa, *Birokrasi Pemerintahan...*, h. 100.

Program *Home Care* adalah bentuk pelayanan bagi lanjut usia yang di rumah atau di tengah-tengah keluarga dengan didampingi oleh seorang pendamping dalam pemenuhan kebutuhannya.<sup>86</sup>

Bentuk pelayanan program *home care* dilakukan dalam bentuk perawatan sosial adalah bentuk pelayanan sosial pada lanjut usia yang membutuhkan perawatan dalam jangka waktu yang lama, pendampingan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kegiatan sehari-hari, perawatan medis/kesehatan bagi lansia di rumah yaitu merawat lanjut usia yang menderita sakit, merawat lanjut usia penyandang cacat, merawat lanjut usia yang uzur (*bed ridden*), konsultasi dan konseling, pendampingan lansia di rumah, pelayanan dalam menyatukan (reunifikasi) lanjut usia dengan keluarganya, pelayanan melalui telepon, informasi, pemberian pemakanan dan pelayanan pemakaman. <sup>87</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka bentuk pelayanan dalam program home care terkait dalam teori fungsi pemerintah yaitu sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat bahwa pelayanan terbentuk sebagai upaya pejabat atau pegawai pemerintahan untuk mengefektifitaskan aktifitas pelayanannya sesuai dengan kondisi orang, makhluk atau lingkungan yang dilayani dalam kondisi apapun.<sup>88</sup>

Dapat penulis simpulkan berdasarkan fungsi pemerintah, bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membuat program sesuai dengan kondisi yang di hadapi lanjut usia.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Dokumen Dinas Sosial Provinsi

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Delly mustafa, *Birokrasi Pemerintahan...*, h. 104.

Sebagaimana kegiatan yang ada dalam program home care yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok serta pelayanan dalam memberi motivasi kepada lanjut usia yang mempunyai permasalahan terhadap ekonomi, mental dan spritual agar lanjut usia dapat mengatasi masalahnya dan dapat hidup secara wajar dan juga memberikan motivasi kepada keluarga lanjut usia agar dapat memperhatikan kesehatan lanjut usia, sehingga lanjut usia merasa diperhatikan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui program home care ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bagi lanjut usia yang merasa tidak diperhatikan. Melalui pemberian kegiatan dari bentuk pelayanan program home care pun secara tidak langsung keluarga dan masyarakat di sekitar lanjut usia mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan serta perhatian untuk lanjut usia. Sehingga, pengetahuan tersebut dapat dilaksanakan seterusnya oleh keluarga maupun masyarakat.

### b. Program ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar)

Program Aslut adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perhatian dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya. <sup>89</sup>

Kriteria penerima program ASLUT adalah lanjut usia yang mengalami sakit menahun, dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur (*beddridden*) sehingga

lxxxvii

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Dokumen Dinas Sosial Provinsi

tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan miskin dan terlantar. <sup>90</sup>

Dari penjelasan program ASLUT tersebut sama halnya dengan jaminan sosial. Secara luas, jaminan sosial mencakup bantuan sosial berupa kebutuhan dasar hidup, jaminan sosial terhadap risiko seperti sakit, usia lanjut, pengangguran, pemeliharaan publik dan sebagainya. Gagasan mengenai jaminan sosial itu berasal dari realisasi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan warganya dengan baik terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk tertentu seperti kebutuhan, kemiskinan, penyakit, buta huruf, pengangguran dan usia lanjut. <sup>91</sup>

Jaminan sosial adalah konsep Islam yang berasal dari ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. <sup>92</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19:

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (Q.S Adzariyat 51:19)

Dari ayat Al- Qur'an yang dijelaskan di atas, bahwa Negara Islam, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang tidak

\_

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 282

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Fundamental Of Islamic Economic System, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012, h. 281.

mempunyai segala kebutuhan, bertanggung jawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya juga dikemukakan oleh sadr bahwa fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi salah satunya berkenaan dengan bentuk jaminan sosial adalah didasari atas kenyataan bahwa setiap individu memiliki kemampuan berbeda-beda. Dalam hal ini, jika individu dalam kondisi yang tidak mampu melakukan aktifitas kerja produktif maka negara wajib mengaplikasikan jaminan sosial dalam bentuk pemberian uang secara tunai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk memperbaiki standar kehidupannya. 93

Hal tersebut sesuai dengan yang di katakan oleh bapak NR yang menjelaskan adanya program aslut yang merupakan program dari pemerintah pusat langsung berupa anggaran yang diberikan setiap bulan 200 ribu melalui kantor pos yang ada di setiap kabupaten. <sup>94</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan program ASLUT atau asistensi lanjut usia terlantar merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dan perhatian dalam mengangkat harkat dan martabat lanjut usia dalam memperoleh kesejahteraannya. Pemberian program aslut ditujukan untuk lanjut usia dalam kategori lanjut usia yang tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti halnya dalam keadaan sakit dan yang tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 330.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Wawancara dengan NR selaku responden, pada tanggal 01 Agustus 2016.

Sehingga, program aslut yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat dapat membantu lanjut usia yang terlantar maupun lanjut usia yang tidak berpenghasilan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## c. Program usaha ekonomi produktif (UEP)

Program usaha ekonomi produktif adalah bantuan kegiatan usaha ekonomi yang ditujukan untuk lanjut usia sehat, aktif dan produktif. Tujuan program usaha ekonomi produktif lanjut usia adalah untuk memberikan kesempatan kepada lanjut usia sehat, aktif dan produktif agar tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menjamin kelangsungan pendapatannya (*income*) nya guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bantuan bersifat langsung kepada lanjut usia, namun sasarannya benarbenar dipilih dari lanjut usia yang masih sehat, aktif, dan produktif. <sup>95</sup>

Bentuk bantuan berupa uang tunai di salurkan melalui dana dekonsentrasi yang diberikan kepada lanjut usia setelah melalui proses seleksi yang dilakukan dinas sosial Kabupaten/Kota dan dinas sosial provinsi yang mekanisme dan kriterianya ditetapkan dalam buku pedoman bantuan usaha ekonomi produktif.<sup>96</sup>

Melihat kondisi lanjut usia yang berada pada permasalahan ekonomi, hal tersebut termasuk dalam tugas dan tanggung jawab negara dalam kegiatan ekonomi salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Umat Islam harus memiliki pengalaman, kemampuan, sarana, dan

<sup>96</sup> Ibid..

<sup>95</sup> Dokumen Dinas sosial Provinsi kalimantan Tengah

prasarana yang membuat mereka mampu untuk berproduksi guna memenuhi kebutuhan hidup.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar umat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri yaitu : <sup>97</sup>

- Membuat perencanaan berdasarkan data statistik dan pengamatan terhadap realitas yang ada di lapangan serta skala prioritas setiap program.
- 2) Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menempatkannya pada posisi yang sesuai dengan keahlian serta berupaya menghindarkan penyerahan sesuatu kepada yang bukan ahlinya.
- Memfungsikan aset yang ada dengan sebaik-baiknya dan tidak membiarkan sesuatu menjadi sia-sia.
- 4) Konsolidasi antara cabang produksi

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu produksi dengan lainnya dan tidak ada satu aspek pun yang diabaikan, seperti mengarahkan perhatian pada sektor pertanian dengan tidak mengabaikan sektor industri. Untuk itu, pentingnya membuat perencanaan berdasarkan studi lapangan dan data statistik untuk mengetahui kebutuhan masyarakat serta kekurangan yang harus dipenuhi. <sup>98</sup>

Berdasarkan uraian di atas hal tersebut sejalan dengan fungsi pemerintah yaitu sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat. Fungsi pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> *Ibid.*, h. 197

dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial warga masyarakat, dalam arti: semakin tinggi taraf hidup warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar (*bargaining position*), dan semakin integratif masyarakat. <sup>99</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu ekonomi lanjut usia yaitu melalui program bantuan usaha ekonomi produktif atau UEP yang merupakan bantuan berupa uang tunai untuk modal tambahan yang diberikan kepada lanjut usia yang sebelumnya sudah mempunyai usaha kecil-kecilan. Dalam bentuk pemberian program ini yang mana langkah yang dilakukan dengan diberikan bimbingan bagaimana cara mengelola usaha tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan upaya pemerintah untuk mensejahterakan ekonomi lanjut usia melalui program bantuan usaha ekonomi produktif sangat efektif, hal tersebut dapat dikatakan cukup berhasil dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia yang masih produktif namun tidak mempunyai modal dalam meningkatkan usahanya. Dengan adanya program bantuan usaha ekonomi produktif dapat terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia sehingga mereka tidak merasa terpuruk dengan keadaan mereka di masa tua. Hal ini terbukti dengan kondisi lanjut usia yang membaik lanjut usia yang produktif dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari melalui usaha kecil-kecilan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan lanjut usia pemerintah telah menjalankan

 $<sup>^{99}</sup>$  Delly Mustafa,  $Birokrasi\ Pemerintahan...,$ h. 102

kebijakannya yaitu dengan membuat program-program untuk lanjut usia yang berada pada sistem pelayanan luar panti yaitu melalui program *Home Care*, program ASLUT (asistensi lanjut usia terlantar) dan UEP (usaha ekonomi produktif). Pada dasarnya inti dari ketiga program tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu membantu memenuhi segala kebutuhan lanjut usia yang artinya kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemerintah telah melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para lansia begitu sulit sehingga adanya rasa kepedulian terhadap permasalahan yang dialami oleh lanjut usia dengan memberikan bermacam program demi membantu permasalahan lansia tersebut.

Berkenaan dengan program yang disalurkan pemerintah untuk lanjut usia merupakan fungsi pemerintah dalam ekonomi yaitu sebagai fungsi distribusi.

Fungsi distribusi dilakukan untuk mencapai pembangunan pemerataan dan kesejahteraan yang seimbang, Islam memberikan nilai-nilai pembangunan berdasarkan pada keyakinan bahwa umat Islam merupakan umat terbaik , *khair ummat*. Peranan negara dalam mengambil dan memutuskan kebijakan yang efektif dan tepat dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuannya adanya negara. Jadi, tujuan negara adalah agar dapat mengayomi warganya dalam membantu menetapkan kesejahteraan seluruh manusia. <sup>100</sup>

Maka hal tersebut, dengan maksud pemerintah mengupayakan pendapatan lanjut usia melalui program maupun layanan agar dapat dimanfaatkan oleh lanjut usia. Sebagaimana, maksud distribusi bertujuan untuk

Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 88.

menyalurkan barang dan jasa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Sehingga, fungsi tersebut sama dengan pemanfaatan program yang diberikan pemerintah dapat dirasakan oleh lanjut usia dalam panti sosial maupun diluar panti sosial agar dapat menopang kehidupannya pada kesejahteraan.

# 2. Peran Pemerintah Terhadap Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

Menghadapi permasalahan penduduk lanjut usia, pemerintah mempunyai program-program untuk menangani permasalahan yang di hadapi oleh lanjut usia. Seperti halnya program untuk sistem pelayanan di luar panti sosial yaitu melalui program *home care*, asistensi lanjut usia terlantar (ASLUT) dan usaha ekonomi produktif (UEP). Selain program tersebut pemerintah mengatasi permasalahan lanjut usia melalui pelayanan sistem panti sosial yang menampung para lanjut usia terlantar maupun ditelantarkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak BS mengenai peran pemerintah terhadap lanjut usia yang berada pada panti sosial tresna werdha sinta rangkang sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan program pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia yang dilaksanakan melalui program-program reguler berupa kegiatan dan bimbingan pelayanan yang mana program-program tersebut bertujuan untuk kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia terlantar maupun yang ditelantarkan serta dalam pemberian kegiatan program pelayanan kepada lanjut usia tidak dipungut biaya atau gratis.

Program reguler ini adalah program pokok dinas sosial provinsi kalimantan tengah, di mana program ini menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang berasal dari keluarga yang tidak mampu tanpa di pungut biaya dan para lanjut usia di tampung dalam asrama. <sup>101</sup>

Berikut merupakan kegiatan pelayanan yang ditujukan untuk lanjut usia:

- a. Pelayanan fisik (pengasramaan, permakanan, pakaian)
- b. Pelayanan keagamaan (bimbingan rohani, tuntunan beribadah)
- c. Pelayanan sosial (bimbingan individu/kelompok)
- d. Pelayanan keterampilan (kegiatan penyaluran hobi, dan pengisian waktu luang)
- e. Pelayanan psikologis (konsultasi, terapi kelompok)
- f. Pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian obat-obat ringan)
- g. Pelayanan pendampingan (mendampingi kegiatan sehari-hari, mendampingi kegiatan di luar panti)
- h. Rekreasi (dharmawisata, mendengarkan musik)
- i. Pelayanan pemakaman( pengurus jenazah). 102

Di samping program pelayanan di atas dilaksanakan yang tidak kalah penting adalah program Nursing Care yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Perawatan Khusus (Nursing care) lanjut usia merupakan pelayanan pendampingan dan perawatan lanjut usia di panti atau lembaga yang dilaksanakan melalui kegiatan sehari-hari oleh tenaga profesional (pekerja

 $<sup>^{101}</sup>$  Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang  $^{102}$   $Ibid.,\,$ 

sosial/perawat/dokter/psikolog), dengan memiliki beberapa fungsi antara lain rehabilitas dan perlindungan serta perawatan. <sup>103</sup>

Program pelayanan yang sudah disebutkan di atas, disusun berdasarkan kebutuhan para lanjut usia dan kemudian dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dan bimbingan pelayanan yang sesuai pada undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.<sup>104</sup>

Namun, berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dalam pelaksanaan program pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia yang berada pada panti sosial tresna werdha sinta rangkang bahwa tidak semua program tersebut dapat diikuti oleh 100 orang lanjut usia karena sebagian dari mereka ada yang berada dalam kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian dalam memberikan program pelayanan yang telah ditetapkan tidak dipungut biaya atau gratis, yang mana pelayanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia yang ditanggung oleh pihak panti yang berasal dari dana pemerintah. Dana tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia yang berjumlah 100 orang. Mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di panti sosial tresna werdha sinta rangkang yang digunakan sebagai alat yang membantu dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia cukup memadai dalam menunjang kegiatan dan kebutuhan lanjut usia.

Terkait dengan pemberdayaan lanjut usia yang berada dalam Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang ini melalui kegiatan bimbingan keterampilan.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Ibid..

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Tim Penyusun, *Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 620.

<sup>105</sup> Hasil Observasi Penulis 07 September 2016

Bimbingan keterampilan yang diberikan dengan membuat kerajinan tangan dari barang atau bahan yang tidak terpakai (bahan bekas), ada juga bahan yang sudah disediakan oleh petugas panti seperti bahan untuk pembuatan lanjung yang kemudian selanjutnya bahan untuk keterampilan dibeli sendiri oleh lanjut usia dan disediakan juga lahan untuk berladang bagi lanjut usia yang ingin bercocok tanam. Hasil dari karya-karya kerajinan tangan lanjut usia berupa bakul, lanjung, pisau, tas rajut sapu lidi dan untuk kegiatan lanjut usia lainnya ada yang berladang dengan menanam sayur-sayuran seperti lombok, bayam dan bawang prey. Kemudian hasil dari penjualan karya kerajinan tangan seperti bakul, tas rajut, lanjung dan pisau yang di buat oleh lanjut usia yang kemudian di pamerkan dan dijual di acara pameran oleh pihak dinas sosial dan sebagian ada juga lanjut usia yang menjual langsung ke pasar dan sebagian juga ada pembeli yang datang langsung ke panti untuk membeli hasil karya maupun hasil dari ladang mereka. Hasil dari penjualan tersebut digunakan lanjut usia untuk memenuhi kekurangan kebutuhan seperti membeli teh, gula dan lainlain. Dalam bimbingan keterampilan ini sekaligus untuk mengisi waktu luang lanjut usia dalam panti. Pemberdayaan lanjut usia melalui bimbingan keterampilan dapat memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif para lansia meskipun mereka berada pada panti tersebut. 106

Dari observasi penulis dalam bimbingan keterampilan tersebutpun tidak semua lanjut usia dapat menikmati sarana dan prasarana tersebut seperti halnya

 $<sup>^{106}\,\</sup>mathrm{Hasil}$  observasi penulis pada 07 September 2016

lahan untuk berladang. Karena keterbatasannya lahan yang berada dalam panti tersebut. Sehingga, sebagian lanjut usia ada yang tidak mempunyai kegiatan. <sup>107</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa peran pemerintah terhadap lanjut usia melalui sistem pelayanan panti sosial tresna werdha sinta rangkang cukup baik. Hal tersebut terbukti dengan memberikan program pelayanan kepada lanjut usia yang berada dalam panti sosial tresna werdha sinta rangkang sudah sesuai dengan undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.

Menjalankan program pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak panti sosial tresna werdha sinta rangkang yang diberikan kepada lanjut usia dijalankan dengan baik. Program pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para lanjut usia seperti halnya memberi makanan harian kepada para lanjut usia 3 kali dalam 1 hari serta bimbingan kegiatan lainnya yang sudah terjadwal. Dengan adanya program pelayanan dalam panti sosial tresna werdha Sinta rangkang tersebut dapat membantu lanjut usia yang terlantar maupun ditelantarkan dapat memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga, dengan terpenuhinya kebutuhan maka lanjut usia dapat mencapai kesejahteraan sosial meskipun tidak berada dalam lingkungan keluarga.

Namun, jika dilihat dari proses penerimaan di panti sosial tresna werdha sinta rangkang di dalam penerimaan klien atau lanjut usia dibatasi dengan kriteria tertentu yaitu dengan :

### 1) Berusia 60 tahun ke atas

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Hasil Observasi penulis pada tanggal 07 September 2016

- 2) Terlantar, tidak berdaya mencari nafkah sendiri
- 3) Tidak mempunyai sanak keluarga/mempunyai keluarga tetapi tidak mampu memelihara orang tuanya
- 4) Sehat jasmani dan rohani (tidak lumpuh, tidak buta, tidak mengalami gangguan kejiwaan)<sup>108</sup>

Jika dilihat dari kebijakan pemerintah di panti sosial tresna werdha sinta rangkang dalam penerimaan lanjut usia yang hanya menerima dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam artian tidak menerima lanjut usia jika dalam keadaan tidak sehat seperti keadaan cacat fisik atau cacat mental. Dengan alasan, bahwa keluarga dan masyarakatlah yang harus mendampingi maupun memperhatikan lanjut usia dalam keadaan tersebut. Namun, bagaimana halnya dengan lanjut usia yang tidak mempunyai keluarga tetapi dalam kondisi cacat fisik. Hal ini yang seharusnya perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah, dengan adanya permasalahan tersebut yang dihadapi oleh lanjut usia maka perlu adanya sikap kepedulian, lansia membutuhkan kepedulian dan perhatian dari pemerintah. hal ini maka perlu adanya sebuah tindakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan lanjut usia agar terpenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya dengan tidak menentukan kebijakan tersebut dalam panti sosial karena, bagi lansia yang dalam keadaan tersebut dan tidak mempunyai keluarga maupun tempat tinggal adalah panti sosial tresna werdha sinta rangkang tersebut. Maka dalam hal ini, peran pemerintah dengan penetapan kebijakan masih kurang jika dilihat dari prosedur pelayanan lanjut

 $<sup>^{108}</sup>$  Dokumen Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang

usia. Sehingga, adanya ketidakseimbangan dalam memperoleh programprogram maupun pelayanan dari pemerintah dalam sistem pelayanan melalui panti sosial tresna werdha sinta rangkang.

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang membantu masyarakat dalam meningkatkan dan memperbaiki kemampuan masyarakat dalam mencapai kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan. Seperti dalam hasil penelitian bahwa peran pemerintah terhadap lanjut usia yang berada pada panti sosial tresna werdha sinta rangkang dengan memberikan berbagai pelayanan untuk lanjut usia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Hal ini sangat membantu dalam memperbaiki kualitas kehidupan lanjut usia. Dalam hal ini pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia berperan sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator yang dipaparkan sebagai berikut.

## a) Entrepreneur

Peran pemerintah sebagai entrepreneur yaitu dengan melakukan kegiatan bimbingan keterampilan kepada lanjut usia untuk usaha mereka dalam panti sosial tersebut seperti membuat anyaman dan berladang. Hal ini ditujukan untuk membuat lanjut usia lebih mandiri.

## b) Koordinator

Peran pemerintah sebagai koordinator yaitu dengan mendirikan panti sosial tresna werdha sinta rangkang, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lanjut usia yang terlantar maupun ditelantarkan dengan mengkoordinir melalui panti sosial tresna werdha sinta rangkang tersebut.

### c) Fasilitator

Peran pemerintah daerah dalam fasilitator ini memberikan berbagai pelayanan program bimbingan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk digunakan lanjut usia seperti ruang perawatan, Musholla, Dapur panti, ruang fungsional, asrama, ruang isolasi, ruang keterampilan. Hal ini untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan yang ada dalam panti sosial tresna werdha sinta rangkang.

### d) Stimulator

Peran pemerintah sebagai stimulator dengan pemerintah berperan sebagai stimulan dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yaitu dengan cara memberikan bantuan dana untuk usaha kemudian hasil dari usaha maupun karya lanjut usia seperti tas rajut, lanjung, bakul dan pisau dipertunjukkan melalui acara pameran. Hal ini dilakukan untuk memotivasi lanjut usia untuk terus berkarya dalam mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa hal tersebut termasuk kepada peran pemerintah daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh :

Lincolin Arsyad mengatakan bahwa ada empat peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam pembangunan di daerah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya dalam meningkatkan peluang kerja untuk lanjut usia yang produktif melalui bimbingan keterampilan. Sebagaimana hal ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lanjut usia melalui bimbingan keterampilan yang telah berupaya untuk dapat menjalankan peranannya sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator dengan semaksimal mungkin.

Segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk lanjut usia yaitu dengan maksud memenuhi kebutuhan lanjut usia dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi lanjut usia. Untuk lanjut usia mencapai kemaslahatannya, maka pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan lanjut usia dengan terpenuhinya kebutuhan primer. Dalam konsep *Maqāsid Syari'ah*, kebutuhan primer termasuk kepada kebutuhan *d}aruriyāt* yaitu dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

### a) Pemeliharaan Agama

Pemerintah melaksanakan perannya terhadap lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia dan termasuk kepada pemeliharaan agama lanjut usia. Untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia di panti sosial dalam memelihara agama yaitu melalui pelayanan keagamaan dalam hal tuntunan beribadah. Seperti penyediaan mushola dan mesjid, agar lanjut usia dapat melaksanakan ibadahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan iman dan akidah lanjut usia.

#### b) Jiwa dan akal

Kebutuhan dalam pemeliharaan jiwa dan akal yang meliputi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan yang harus terpenuhi untuk menjaga jiwa dan akal manusia. Yang artinya kebutuhan makan, minum pakaian dan

tempat tinggal. Maka, hal ini pemerintah memenuhi kebutuhan lanjut usia yaitu dengan memberikan makan dalam 3 kali sehari kemudian disediakannya wisma untuk lanjut usia tempatkan dan juga untuk pemeliharaan jiwa, pemerintah juga telah menyediakan pelayanan kesehatan dengan tersedianya dokter, ambulans dan obat-obatan.

### c) Keturunan dan harta

Dalam hal memelihara keturunan, pemerintah mengatasi lanjut usia yang ditelantarkan keluarganya dengan mengurus lanjut usia tersebut dengan memberdayakan lanjut usia di panti sosial tresna werdha sinta rangkang. Dengan memenuhi segala kebutuhan lanjut usia baik dalam sandang pangan dan papan serta pemeliharaan harta pemerintah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk digunakan lanjut usia.

Dengan demikian uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah berupaya agar lanjut usia yang terlantar maupun ditelantarkan dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam upaya pemerintah memenuhi segala kebutuhan lanjut usia dalam unsur pemeliharaan agama, jiwa, akal keturunan dan harta.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil penelitian yang telah diperoleh dan dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai fungsi pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia dan peran pemerintah terhadap lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Kota Palangka Raya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Fungsi pemerintah terhadap perekonomian lanjut usia di kota palangka raya yaitu melalui fungsi pemberdayaan masyarakat dengan program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) yang merupakan bantuan dana untuk modal usaha kecil-kecilan yang bertujuan untuk menopang ekonomi lanjut usia.
- 2. Peran pemerintah untuk lanjut usia di panti sosial tresna werdha sinta rangkang kota Palangka Raya dengan melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat melalui pemberian program bimbingan kepada lanjut usia yang terdiri dari berbagai bimbingan dan kegiatan bersifat pemberian jasa yang berupa pembinaan, pelayanan kesehatan, penyantunan dan pemberian makan sandang dan pangan.

### B. Saran

- Diharapkan dalam pelaksanaan program-program seperti usaha ekonomi produktif lebih ditingkatkan lagi dalam pendataan agar penerima program UEP tidak hanya satu tempat.
- 2. Sebaiknya dalam membuat kebijakan dalam panti sosial tresna werdha sinta rangkang agar tidak membatasi prosedur penerimaan klien. Sehingga, lanjut usia yang terlantar maupun ditelantarkan mendapatkan semua pelayanan dalam panti sosial tersebut. Serta dalam memberikan anggaran lebih ditambah lagi agar jumlah sarana maupun prasarana lebih lengkap seperti halnya dengan menyediakan lahan dan bahan-bahan untuk membuat keterampilan lanjut usia lebih di tambah lagi. Karena, kegiatan tersebut guna memberdayakan lanjut usia agar dapat lebih mandiri.

### DAFTAR PUSTAKA

## A. Kepustakaan

- Adi widigdo, Suroso Rendro *The Essentials of Economics:for Grade VIII of Junior High School and Islamic Junior High School*, Bandung: Prentice Hall, 2010.
- Al Qaradhawi, Yusuf *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta,2002.
- Aziz, Abdul *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Azizah, Lilik Ma'rifatul Keperawatan Lanjut Usia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011,
- Azmi, Sabahuddin *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik, Konsep Perpajakan Dan Peran Bait Al-Mal*, Bandung : Penerbit Nuansa, 2005.
- Bakri, Asafri Jaya Konsep Maqashid Syari'ah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Chaudhry, Muhammad Sharif Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar Fundamental Of Islamic Economic System, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.
- Chamid, Nur *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chapra, M. Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press 2000.
- -----, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Departemen Agama RI, Al-Our'an dan Terjemah, Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Effendi Satria dan M.Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Persfektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Hamdanah, Psikologi Perkembangan, Malang: Setara Press, 2009.
- Henry Faizal Noor, Ekonomi Publik, Padang: Akademia Permata, 2013.
- Karim, Adiwarman Ekonomi Mikron Islami, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Katsir, Ibnu *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Terjemahan Salim Bahreisy dan Said bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.
- Khadijah dan M. Taufiqqurrahman, *Palangka Raya Dalam Angka 15*, t.tp: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2015.
- Koto, Alaidin *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mangkoesoebroto, Guritno Ekonomi Publik, Yogyakarta: BPFE, 1993.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000.
- Mustafa, Delly Birokrasi Pemerintahan, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nawawi, Zaidan Manajemen Pemerintahan, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ndraha, Taliziduhu *Kybernologi: Sebuah Rekonstrusi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- -----, Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rahmad, Muhammad & Kurniawan, Visi & Aksi Ekonomi Islam: Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip taradin dalam Praktek Bank Islam Modern, Malang: Intimedia, 2014.
- Rosidi, Abidarin dan Anggraeni Fajriani, *Reinventing Government:Demokrasi Dan Reformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2008.
- -----, Ekonomi Pembangunan, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010.
- -----, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukirno, Sadono *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Tiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2007.
- Tim Penyusun, *Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2008.
- Uman, Chaerul dkk, *Ushul Fiqih* I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Wahyunita, Vina Dwi dan Fitrah, *Memahami Kesehatan Pada Lansia*, Jakarta: CV. Trans info media, 2010.
- Yusuf, Yasin *Program Simpanan Keluarga Sejahtera Persfektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Palangka Raya: IAIN, 2015. t.d

#### **B.** Telusur Internet

- Kebutuhan Orang Lanjut Usia, <a href="http://www.Psychologymania."><u>Http://www.Psychologymania.</u></a>
  <a href="http://www.Psychologymania.">Com/2012/07/Kebutuhan-Hidup-Orang-Lanjut-Usia.Html</a>. (Di akses Pada 08 November 2015)
- Muhadditsir Rifa'i, Memaknai Kembali Birr Al-Walidain: Suplemen Swara RahimaEdisi46, <a href="http://www.rahima.or.id/index.php.article&catid=Asuplemen&id=1253A2014-11-04&formatpdf&option.com.content&Itemid">http://www.rahima.or.id/index.php.article&catid=Asuplemen&id=1253A2014-11-04&formatpdf&option.com.content&Itemid</a>. (Di akses pada 08 November 2015)
- Ali Nazmudin, Peran Pemerintah Desa terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Tunas Cipetung (Studi Di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015. t.d, <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id/15578/1/bab2daftarpustaka.pdf">http://digilib.uin-suka.ac.id/15578/1/bab2daftarpustaka.pdf</a>. Di akses pada tanggal 25 Maret 2016.
- Faqih As'arie, Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah (studi pada pemerintah daerah kota Tanggerang selatan), Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2014.t.d, <a href="http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/1234567/28809/1/FAQ">http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/1234567/28809/1/FAQ</a> IHASE28099ARIEFSH.Pdf,. Di Akses Pada Tanggal 25 Maret 2016.
- Ramadhani Bondan Puspitasari, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Di Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Sidoarjo:Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015, t.d. <a href="http://fisip.umsida.ac.id/tinymcpuk/gambar/file/6.bondan.pdf">http://fisip.umsida.ac.id/tinymcpuk/gambar/file/6.bondan.pdf</a>. Di Akses Pada Tanggal 25 Maret 2016
- Http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5281eac227ed0/parent/lt 5281ea4c63d6. Di akses pada 19 Maret 2016